




LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2025

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Jln. Setia Budi No. 200 Painan Kode Pos : 25651
Telp. (0756) 21293, E-mail : dpmdppkbessel@gmail.com

 <https://dpmdppkb.pesisirselatankab.go.id/>
DPMPPKB Kab. Pesisir Selatan



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH**

Jln.Pahlawan No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telepon (0756) 21601/ Fax. (0756) 21601

Laman: <https://inspekda.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: Inspektoratpessel@yahoo.co.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

**LKj DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Painan, 12 Maret 2026

Inspektur

Evafauza Yuliasman, S.E., MSi.

Pembina Utama Muda I(IV/c)

NIP 19670712 199202 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunianya serta bimbingan kemudahan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan telah merespon tersebut, sehingga dapat tersusun dengan baik.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, yang berfungsi sebagai bahan penilaian kinerja, wujud transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat serta sebagai pengendali peningkatan kinerja berdasarkan sasaran strategis, urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikian disampaikan semoga dokumen penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dapat bermanfaat dan digunakan sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Painan, 30 Januari 2026



IKHTISAR EKSEKUTIF

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, dengan segala rahmat dan karunianya Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 telah selesai disusun. Penyusunan LKj ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan perwujudan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui tujuan dan sasaran strategis. Tujuan dan sasaran strategis dicapai melalui kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan dan sumber dana lainnya (APBD Provinsi dan APBN) Tahun Anggaran 2025 dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap Pemerintah dan meningkatkan kinerja instansi Pemerintah dalam menjalankan misi, serta diharapkan dapat terciptanya ke Pemerintahan yang baik (*good governace*).

Penyusunan LKj Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 ini, disusun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan telah merespon tersebut, sehingga dapat tersusunnya dengan baik Laporan Kinerja Tahun 2025.

Laporan Kinerja Tahun 2025 ini disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 238); dan yang diturunkan pada Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 86 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026; dan review terhadap target kinerja yang dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada Perangkat Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam upaya mendukung capaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu : Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan tergambar dalam suatu bentuk untuk mencapai masa depan dengan cita-cita yang ingin diwujudkan dan mengacu pada **Visi Bupati/Wakil Bupati Pesisir Selatan, yaitu :**

“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat, didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional”.

Selanjutnya Misi yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan mengacu kepada **Misi Bupati/Wakil Bupati Pesisir Selatan Nomor 1, 2, 4, 5, 6, yaitu :**

- 1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan;**
- 2. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat;**
- 4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan;**
- 5. Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing;**
- 6. Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenteram dan Dinamis;**

Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu : “Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan serta Keluarga Berkualitas”.

Sedangkan untuk pencapaian kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan dengan melaksanakan 6 Program, 14 Kegiatan dan 42 Sub Kegiatan sesuai dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan 3 Sasaran Strategis dan 4 Indikator Kinerja, sebagai berikut :

Tabel 1. Capaian Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Program	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (81,00)	A (80,21)	99,02%	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.502.538.820	Rp. 5.380.558.383	97,78%
		Jumlah Nagari Mandiri	56 Nagari	87 Nagari	155,36%	Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 524.488.959	Rp. 476.655.498	90,88%
						Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 909.705.488	Rp. 761.583.920	83,72%
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	80	93	116,25%				
3.	Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas	Persentase PUS yang ber-KB	62,14%	63,77%	102,62%	Pengendalian Penduduk	Rp. 259.196.099	Rp. 189.923.447	73,27%
						Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 6.065.897.000	Rp. 4.260.275.110	70,23%
						Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 2.248.600.000	Rp. 2.135.981.691	94,99%
Total					118,31%		Rp. 15.510.426.366	Rp. 13.204.978.049	85,14%

Sumber Data : Capaian Kinerja DPM DPPKB Kab. Pesisir Selatan Tahun 2025

Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2025 dari 3 Sasaran Strategis dengan capaian sasaran strategis 118,31% dan capaian program 85,14%, berdasarkan klasifikasi penilaian termasuk Sangat Baik. Hasil kinerja yang Sangat Baik ini diharapkan untuk Tahun akan datang supaya dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi menuju Sangat Baik, serta mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis sehingga diharapkan dimasa yang akan datang semua capaian sasaran strategis dapat tercapai.

Semoga laporan kinerja ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan untuk mengevaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan selama 1 Tahun, sehingga dapat melaksanakan kinerja lebih produktif, efektif dan efisien pada Tahun berikutnya sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, 30 Januari 2026



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	3
1.4. Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama	13
1.5. Landasan Hukum	20
1.6. Sistematika Penyusunan	23
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis Perangkat Daerah	24
2.2. Rencana Kinerja	29
2.3. Perjanjian Kinerja	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja	33
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja	34
3.3. Capaian Kinerja Perangkat Daerah	37
3.4. Realisasi Anggaran	65
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	72
4.2. Saran	74
DAFTAR LAMPIRAN	
- Penghargaan Yang Diterima Perangkat Daerah	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025	iv
Tabel 1.1.	Komposisi ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Kelamin	11
Tabel 1.2.	Komposisi ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Berdasarkan Jenjang Pendidikan	12
Tabel 1.3.	Aspek Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025	13
Tabel 2.1.	Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026	27
Tabel 2.2.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029	28
Tabel 2.3.	Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025	30
Tabel 2.4.	Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Program Pendukung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025	31
Tabel 2.5.	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025	32
Tabel 2.6.	Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025	32
Tabel 3.1.	Klasifikasi Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Kinerja Tahun 2025	33
Tabel 3.2.	Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025	34
Tabel 3.3.	Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025	37
Tabel 3.4.	Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Tahun 2025	40
Tabel 3.5.	Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	41
Tabel 3.6.	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dalam Dokumen Perangkat Daerah Strategis Organisasi	42

Tabel 3.7.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Standar Kabupaten Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024	42
Tabel 3.8.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Standar Provinsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	42
Tabel 3.9.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Standar Nasional Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2023	43
Tabel 3.10.	Perbandingan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Standar Provinsi dan Nasional Tahun 2025	43
Tabel 3.11.	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 700.1.2.1/836/INSP/2025	44
Tabel 3.12.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	44
Tabel 3.13.	Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Tahun 2025	46
Tabel 3.14.	Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	47
Tabel 3.15.	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dalam Dokumen Perangkat Daerah Strategis Organisasi	47
Tabel 3.16.	Jumlah Nagari Mandiri dengan Standar Kabupaten Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025	48
Tabel 3.17.	Jumlah Nagari Mandiri dengan Standar Provinsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	48
Tabel 3.18.	Jumlah Nagari Mandiri dengan Standar Nasional Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Tahun 2025	49
Tabel 3.19.	Perbandingan Jumlah Nagari Mandiri dengan Standar Provinsi dan Nasional Tahun 2025	49
Tabel 3.20.	Rekap Data ID Status Nagari Mandiri di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025	51
Tabel 3.21.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	54
Tabel 3.22.	Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah Tahun 2025	56

Tabel 3.23.	Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	56
Tabel 3.24.	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dalam Dokumen Perangkat Daerah Strategis Organisasi	57
Tabel 3.25.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	58
Tabel 3.26.	Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas Tahun 2025	59
Tabel 3.27.	Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	59
Tabel 3.28.	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dalam Dokumen Perangkat Daerah Strategis Organisasi	60
Tabel 3.29.	Persentase PUS yang ber-KB dengan Standar Kabupaten Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025	60
Tabel 3.30.	Persentase PUS yang ber-KB dengan Standar Provinsi Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	61
Tabel 3.31.	Persentase PUS yang ber-KB dengan Standar Nasional Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Tahun 2024	61
Tabel 3.32.	Perbandingan Indeks Pembangunan Keluarga dengan Standar Provinsi dan Nasional Tahun 2025	61
Tabel 3.33.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	62
Tabel 3.34.	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Menunjang Sasaran Strategis	65

DAFTAR GRAFIK

- Grafik 1.1. Komposisi ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian 11
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025
Berdasarkan Jenis Kelamin
- Grafik 1.2. Komposisi ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian 12
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025
Berdasarkan Jenjang Pendidikan

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan 10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Pasal 1 ayat 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Kinerja (LKj) berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, mencakup :

- a. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- b. Realisasi pencapaian target kinerja organisasi;
- c. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
- d. Perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis organisasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja wajib menyusun dan menyajikan LKj atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Entitas Akuntabilitas Kinerja tersebut menyelenggarakan SAKIP secara berjenjang, dengan tingkatan mulai dari entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja, hingga entitas akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKj, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya.

Laporan Kinerja (LKj) ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang. Penyusunan LKj diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format LKj pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi; rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud Penyusunan LKj

Maksud disusunnya LKj Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 ini adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran strategis Tahun 2025.

1.2.2. Tujuan Penyusunan LKj

Adapun tujuan penyusunan LKj Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja

Bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2025. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama Tahun 2025.

2. Aspek Manajemen Kinerja

Bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 bagi upaya perbaikan kinerja di masa datang.

1.3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan berkedudukan di Jalan Setia Budi Nomor 200 Painan, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Gedung perkantoran utama dengan kondisi baik dan fasilitas penunjang masih kurang lengkap. Adapun gedung kantor Balai Penyuluh Keluarga Berencana ada di 15 Kecamatan Se-Kabupaten Pesisir Selatan mengalami rusak ringan, sedang dan berat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

1. Sekretariat;
2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan, Kerja Sama dan Perekonomian Nagari;
3. Bidang Bina Pemerintahan Nagari;
4. Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari;
5. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
6. UPTD.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas;
- e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah;

- f. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauam dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga dinas;
- i. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- j. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran dinas;
- k. Pelaksanaan, pembinaan dan evaluasi program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan di lingkup Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, kebijakan program, kepegawaian dan keuangan di lingkungan dinas;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas;
- c. Penyelenggaraan koordinasi program kerja dinas;
- d. Penyelenggaraan pengkajian dan fasilitasi bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum;

- e. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi antar bidang;
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi dan perencanaan di lingkungan dinas;
- g. Pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab dinas;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan, Kerja Sama dan Perekonomian Nagari

Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan, Kerja Sama dan Perekonomian Nagari mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan teknis bidang pemberdayaan masyarakat, kelembagaan, kerja sama dan perekonomian nagari sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan, Kerja Sama dan Perekonomian Nagari menyelenggarakan fungsi :

- a. Pemahaman tentang peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- b. Penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat, kelembagaan, kerja sama dan perekonomian nagari sebagai pedoman dan acuan kerja;
- c. Perumusan kebijakan teknis kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat, kelembagaan, kerja sama dan perekonomian nagari;
- d. Perumusan perencanaan operasional program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat, kelembagaan, kerja sama dan perekonomian nagari;
- e. Penyusunan bahan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bidang pemberdayaan masyarakat, kelembagaan, kerja sama dan perekonomian nagari;
- f. Pelaksanaan pemantauan, pelaksanaan program dan kegiatan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat, kelembagaan, kerja sama dan perekonomian nagari;

- g. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan masyarakat, kelembagaan, kerja sama dan perekonomian nagari;
- h. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;
- i. Pembagian dan pendistribusian tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya masing-masing;
- j. Pemberian petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja bawahan;
- k. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Bidang Bina Pemerintahan Nagari

Bidang Bina Pemerintahan Nagari mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan teknis bidang bina pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang bina pemerintahan nagari menyelenggarakan fungsi :

- a. Pemahaman tentang peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- b. Penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang bina pemerintahan nagari sebagai pedoman dan acuan kerja;
- c. Perumusan kebijakan teknis kegiatan bidang bina pemerintahan nagari;
- d. Perumusan perencanaan operasional program dan kegiatan di bidang bina pemerintahan nagari;
- e. Penyusunan bahan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bidang bina pemerintahan nagari;
- f. Pelaksanaan pemantauan, pelaksanaan program dan kegiatan teknis di bidang bina pemerintahan nagari;
- g. Penyusunan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang bina pemerintahan nagari;
- h. Pemantauan kegiatan perencanaan dan program di bidang bina pemerintahan nagari;
- i. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;

- j. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari

Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset nagari sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang pengelolaan keuangan dan aset nagari menyelenggarakan fungsi :

- a. Pemahaman tentang peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- b. Penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang pengelolaan keuangan dan aset nagari sebagai pedoman dan acuan kerja;
- c. Perumusan kebijakan teknis kegiatan bidang pengelolaan keuangan dan aset nagari;
- d. Perumusan perencanaan operasional program dan kegiatan di bidang pengelolaan keuangan dan aset nagari;
- e. Penyusunan bahan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset nagari;
- f. Pelaksanaan pemantauan, pelaksanaan program dan kegiatan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset nagari;
- g. Penyusunan saran kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur di bidang pengelolaan keuangan dan aset nagari;
- h. Pemantauan kegiatan perencanaan dan program di bidang pengelolaan keuangan dan aset nagari;
- i. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;
- j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
- k. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

5. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
- b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
- c. Pelaksanaan kebijakan bidang sistem informasi keluarga;
- d. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk daerah;
- f. Pemantauan dan evaluasi kegiatan bidang pengendalian penduduk;
- g. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang pengendalian penduduk;
- h. Perumusan kebijakan teknis daerah bidang keluarga berencana;
- i. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang keluarga berencana;
- l. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang keluarga berencana;
- m. Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-keluarga berencana daerah;
- n. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang keluarga berencana;
- o. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang keluarga berencana; dan.
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

6. UPTD

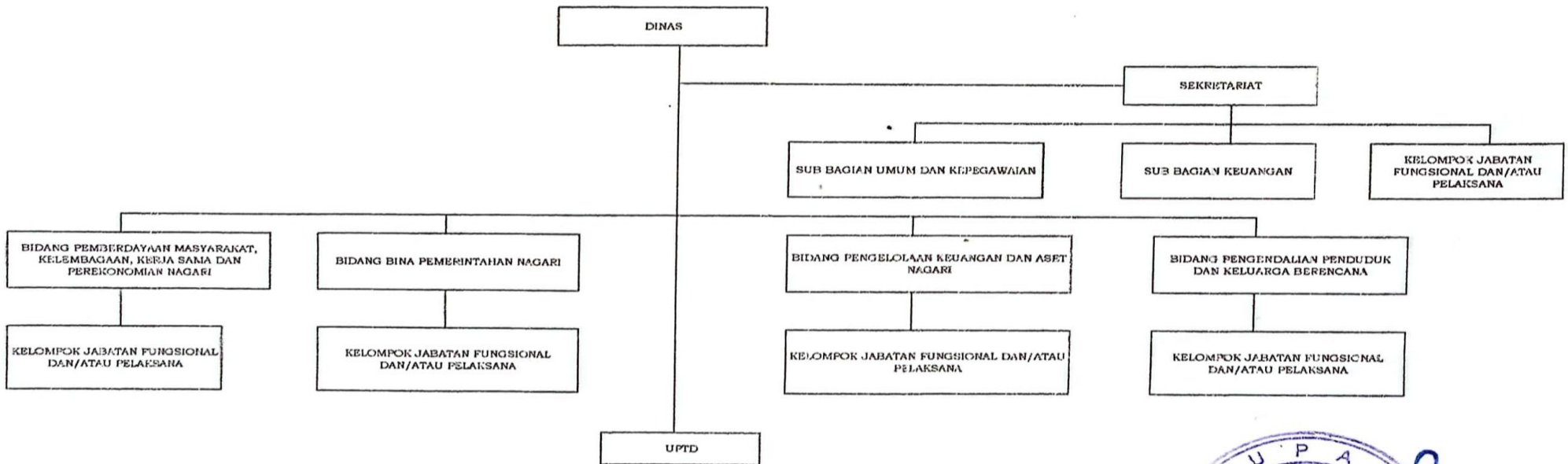
- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang pengendalian penduduk dan keluarga Berencana dapat dibentuk UPTD.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Perencana.
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan, Kerja Sama dan Perekonomian Nagari;
 - Kelompok Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat.
4. Bidang Bina Pemerintahan Nagari;
 - Kelompok Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat.
5. Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari;
 - Kelompok Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat.
6. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - Kelompok Jabatan Fungsional Penata Kependudukan Keluarga Berencana.
7. UPTD, terdiri dari :
 - Balai Penyuluh Keluarga Berencana di 15 Kecamatan.

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR 21 TAHUN 2024
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK
 DAN KELUARGA BERENCANA

SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 KABUPATEN PESISIR SELATAN



Sumber Data : Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

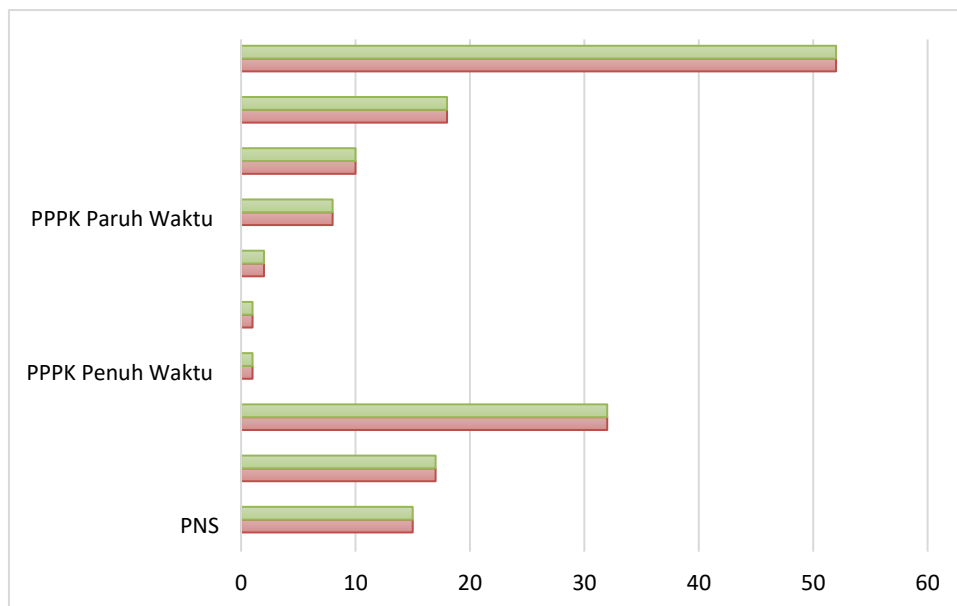
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan memiliki sumber daya manusia yang beragam, dimana jumlah keseluruhan sumber daya manusia, terdiri dari : 32 PNS dan 2 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh Waktu dan 18 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dengan total keseluruhan sumber daya manusia Tahun 2025 sebanyak 55 Orang, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1. Komposisi ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun	ASN									Total
	PNS			PPPK Penuh Waktu			PPPK Paruh Waktu			
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
2025	15	17	32	1	1	2	8	10	18	52
Jumlah	15	17	32	1	1	2	8	10	18	52

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan Tahun 2025

Grafik 1.1. Komposisi ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Kelamin



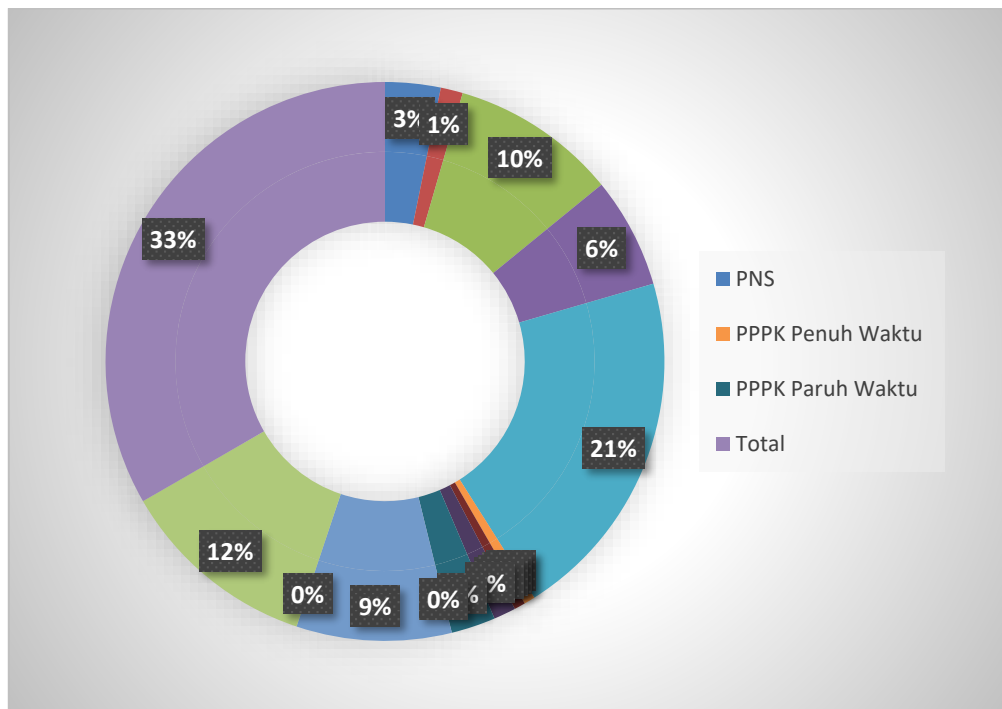
Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan Tahun 2025

Tabel 1.2. Komposisi ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tahun	ASN															Total
	PNS					PPPK Penuh Waktu					PPPK Paruh Waktu					
	SMA	D-III	D-IV/S-I	S-II	Jumlah	SMA	D-III	D-IV/S-I	S-II	Jumlah	SMA	D-III	D-IV/S-I	S-II	Jumlah	
2025	5	2	15	10	32	1	-	1	-	2	4	-	14	-	18	52
Jumlah	5	2	15	10	32	1	-	1	-	2	4	-	14	-	18	52

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan Tahun 2025

Grafik 1.2. Komposisi ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan Tahun 2025

Dari Tabel 1.2. dan Grafik 1.2. diatas dapat dilihat bahwa Komposisi ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Berdasarkan Jenjang Pendidikan, yaitu : SMA, D-III, D-IV/S-I dan S-II dengan ASN, terdiri dari : PNS, PPPK Penuh Waktu dan PPPK Paruh Waktu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4. Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama

Tabel 1.3. Aspek Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan serta Keluarga Berkualitas	1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	1. Meningkatnya Administrasi Pemerintahan Desa	1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang Mengatur Desa 2. Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa 3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 4. Pemilihan Wali Nagari dan Bamus Nagari 5. Pengelolaan Aset Desa 6. Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa 7. Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
		2. Meningkatkan Sarana Pemerintahan Nagari	Meningkatkan Sarana Penunjang Pemerintahan Nagari
		3. Peningkatan Kapasitas Aparatur Lingkup Pemerintahan Nagari	1. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemertintahan Nagari 2. Sosialisasi Regulasi tentang Pemerintahan Nagari 3. Pelatihan Bamus Nagari
		4. Inventarisasi Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1. Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat 2. Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
		5. Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 3. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			4. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 5. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa 6. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 7. Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat kewenangan Provinsi 8. Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat
		6. Mendorong Terciptanya Kemandirian Lembaga Ekonomi dan Inovasi Nagari	1. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Badan Usaha Milik Nagari 2. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
		7. Mendorong Terciptanya Pembangunan Kawasan Perdesaan	1. Pengembangan Kawasan Perdesaan melalui Badan Usaha Milik Nagari Bersama 2. Meningkatkan Pembentukan Kawasan
		8. Mendorong Terbangunnya Produk Unggulan Nagari	1. Meningkatkan dan Memanfaatkan Potensi Nagari 2. Meningkatkan Kerjasama Antar Nagari
	2. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	1. Penguatan Regulasi	1. Mewajibkan Setiap Perangkat Daerah untuk Menciptakan, Menerapkan dan Melaporkan Inovasi
		2. Pemberian Reward dan Punishment	2. Memberikan Penghargaan dan Sanksi Atas Keberhasilan Inovasi
		3. Penguatan Sistem Inovasi	3. Membenahi Sistem secara Holistik, Serentak dan Berdasarkan Isu-Isu Sistemik
		4. Investasi dalam Pengetahuan dan Teknologi	4. Menginvestasikan Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi di Sektor Pemerintah
		5. Pemutakhiran Kerangka Kebijakan	5. Memutakhirkan Kerangka Kebijakan Inovasi Daerah sesuai Perkembangan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
		6. Pembentukan Perangkat Daerah	6. Membentuk Perangkat Daerah yang memiliki Kapasitas untuk Mengangkat Daya Saing Daerah	
		7. Penelitian dan Pengembangan	7. Mengadopsi Proses Produksi yang Inovatif melalui Kegiatan Penelitian dan Pengembangan	
		8. Inovasi Sosial	8. Menciptakan Inovasi Sosial yang Mencakup Struktur Budaya Normatif atau Regulatif	
		9. Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Inovasi	9. Membangun Budaya Kerja dengan Membuat dan Mengembangkan Minimal Satu Inovasi dalam Setiap Tahun Anggaran	
	3. Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas	1. Meningkatkan Penggunaan Alat Kontrasepsi Bagi Pasangan Usia Subur	1. Pemenuhan Ketersediaan Alat Kontrasepsi	2. Meningkatkan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat
				3. Menurunkan Total Fertility Rate (TFR)
		2. Meningkatkan Pelayanan KB	1. Meningkatkan Rasio Aseptor KB	2. Membangun Kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan TNI dalam Peningkatan Pelayanan MKJP
		3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Balai Penyuluh KB	1. Pemenuhan Biaya Operasional Balai Penyuluh KB	2. Pemenuhan Kebutuhan Balai Penyuluh KB dalam Pelaksanaan Target masing-masing Penyuluh KB
4. Meningkatkan Fasilitas Kesehatan dalam Pelayanan KB	1. Meningkatkan Fasilitas Pendukung Pelayanan Kesehatan untuk Pelayanan KB	2. Meningkatkan Fasilitas Kesehatan dan Jejaringnya di Seluruh Tingkat Wilayah yang berkerjasama dengan BPJS Kesehatan dan Memberikan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi sesuai dengan Standarisasi Pelayanan		
		3. Melakukan Kerjasama dengan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat dalam Pemenuhan Fasilitas Kesehatan dalam Penyuluh KB		

Sumber Data : Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 86 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026

❖ **Permasalahan Utama Organisasi**

Identifikasi permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu :

➤ **Permasalahan :**

1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan, Kerja Sama dan Perekonomian Nagari :

1. Belum Optimalnya Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi ke 182 Nagari untuk Memfasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa terhadap RPJM Nagari dan RKP Nagari disinkronisasikan dengan RPJMD Kab. Pesisir Selatan;
2. Belum Optimalnya Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi ke 182 Nagari untuk Memfasilitasi Penyusunan Profil Desa/Nagari terhadap tahapan Perubahan Status Nagari mulai dari Nagari Berkembang, Nagari Maju sampai dengan Nagari tersebut layak dikatakan menjadi Nagari Mandiri;
3. Masih adanya perbedaan pemahaman tentang Kepengurusan KAN dan Historis Adat dimasing-masing KAN di Kab. Pesisir Selatan;
4. Belum banyaknya peran dari LPMN dalam Forum Musrenbang Nagari;
5. Masih kurangnya SDM sebagai Pengurus PKK dan kurangnya peranan PKK dalam Masyarakat.
6. Tidak memadainya anggaran kegiatan KKN yang dilaksanakan di Kab. Pesisir Selatan yang lokasinya berada di berbagai Kecamatan untuk mendukung kegiatan KKN
7. Adanya UPK yang bermasalah dengan hukum;
8. Tidak adanya laporan pertanggungjawaban BUMNag, BUMNag Bersama dan UPK dari pengurus serta banyaknya masa periode kepengurusan habis dan tidak aktif;
9. Tidak sinkronnya kegiatan unit usaha yang dijalankan dengan keadaan dan potensi Nagari akan memberikan Pendapatan Asli Nagari (PAN);
10. Adanya UPK yang belum bertransformasi ke BUMNag Bersama;
11. Tidak dapat diikutinya kegiatan lomba TTG dan BUMNag, baik Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional karena tidak adanya anggaran;
12. Kurangnya Koordinasi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi ke Nagari, Kecamatan dan Provinsi karena keterbatasan anggaran.

2. Bidang Bina Pemerintahan Nagari :

1. Banyaknya permasalahan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Bamus Nagari;
2. Kurangnya kemampuan dan pemahaman Pemerintah Nagari tentang Pengelolaan Keuangan Nagari;
3. Belum memenuhi syarat sebagai PAW Wali Nagari dan Bamus Nagari serta belum sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Belum terkelolanya Penataan Aset Nagari dan kurangnya dukungan anggaran terhadap sarana dan prasarana dalam melaksanakan kegiatan di 182 Nagari;
5. Belum optimalnya Koordinasi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi antara Pemerintah Nagari, Kecamatan dan DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan.

3. Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari :

1. Belum Optimalnya Pelaksanaan APB Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Belum Tertatanya Pengelolaan Aset Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Belum optimalnya Koordinasi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi antara Pemerintah Nagari, Kecamatan dan DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan.

4. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Kurangnya Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana di Tingkat Kecamatan dari 182 Nagari sedangkan Jumlah PKB hanya 36 Orang persebaran tidak merata;
2. Kurangnya minat akseptor dalam menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
3. Kurangnya perhatian dan pembinaan serta dukungan dana untuk Pembinaan Penyuluh Kampung KB;
4. Masih kurangnya pemahaman masyarakat dan dukungan lintas sektor terhadap perkembangan kegiatan di Kampung KB;
5. Pelaksanaan kegiatan harus ditalangi dulu oleh Koordinator Lapangan untuk semua kegiatan BOKB;
6. Keterbatasan anggaran untuk Pemantauan, Monitoring dan Evaluasi dari Kabupaten sebagai Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang sudah dibentuk dari Nagari dan Kecamatan, sedangkan lokasi sasaran yang akan dilakukan pendampingan memerlukan biaya transportasi dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting;

7. Kurangnya dukungan dana APBD sebagai Pendamping Akseptor KB dan Kader KB ke Lapangan yang terdapat 182 Nagari dan 15 Balai Penyuluh KB Kecamatan pada Program Bangga Kencana untuk Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) karena tidak mencukupi dari APBN (BOKB) baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik, maka sangat perlunya support dari APBD (DAU) untuk kelancaran tugas Pendamping Akseptor KB dan Kader KB ke Lapangan di Kabupaten Pesisir Selatan.

➤ **Solusi :**

1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan, Kerja Sama dan Perekonomian Nagari :

1. Mengoptimalkan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi ke 182 Nagari dengan memberdayakan Tenaga Ahli P3PD, Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Desa dan Pendamping Lokal Desa (PLD) Kecamatan untuk mendampingi Nagari dalam rangka Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa terhadap RPJM Nagari dan Indonesia-RKP Nagari tahun berikutnya;
2. Mengoptimalkan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi ke 182 Nagari untuk Memfasilitasi Penyusunan Profil Desa/Nagari terhadap tahapan Perubahan Status Nagari mulai dari Nagari Berkembang, Nagari Maju sampai dengan Nagari tersebut layak dikatakan menjadi Nagari Mandiri dari berbagai aspek yang telah ditetapkan;
3. Agar 37 KAN di Kab. Pesisir Selatan membuat Monografi Adat secara tertulis, agar penyelenggaraan KAN dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
4. Agar LPMN mempunyai peranan dalam Forum Musrenbang Nagari dan memahami Tugas Pokok dan Fungsi dalam kelembagaan di Nagari;
5. Memanfaatkan SDM yang ada untuk dilakukan Sosialisasi dan Pelatihan untuk Meningkatkan Kemampuan Pengurus PKK serta memiliki peranan PKK di masyarakat.
6. Untuk Kegiatan KKN Tematik yang diadakan di Kab. Pesisir Selatan pelaksanaannya langsung dilakukan dilokasi kegiatan KKN;
7. Memfasilitasi data dan informasi terkait UPK yang bermasalah;
8. Memberdayakan Tenaga Ahli P3PD, Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Desa dan Pendamping Lokal Desa (PLD) yang ada untuk mendampingi proses pembentukan dan pengaktifan BUMNag, BUMNag Bersama dan UPK yang bermasalah, habis masa kepengurusan serta yang kurang aktif;

9. Lebih memberdayakan lagi pendamping yang ada di Nagari, Kecamatan maupun Kabupaten untuk memverifikasi Unit Usaha yang ada di Nagari agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Nagari sehingga dapat memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Nagari (PAN);
10. Untuk UPK yang belum bertransformasi diserahkan ke DPMD Provinsi Sumatera Barat;
11. Kegiatan TTG dan BUMNag yang diselenggarakan setiap Tahun tidak diikuti;
12. Merekap data yang dikirim oleh Kecamatan terkait data BUMNag, BUMNag Bersama dan UPK di DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan.

2. Bidang Bina Pemerintahan Nagari :

1. Untuk meminimalisir terjadinya permasalahan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Bamus Nagari perlu dilakukan peningkatan pengetahuan, pemahaman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tentang regulasi dalam melaksanakan tugas Pemerintahan Nagari melalui Peningkatan Kapasitas, Bimtek atau Pembinaan ke Nagari;
2. Perlu dilaksanakan Bimtek secara berkelanjutan untuk Perangkat Nagari dan membuat forum diskusi bagi Perangkat Nagari bersama OPD terkait (DPMDPKB, BPKPAD dan Inspektorat) untuk berkoordinasi tentang Pengelolaan Keuangan Nagari;
3. Mewajibkan setiap Nagari mengirimkan 1 Perwakilan dari 182 Nagari untuk mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Nagari;
4. Agar sesuai dengan persyaratan sebagai PAW Wali Nagari dan Bamus Nagari serta berpedoman dengan peraturan yang berlaku ditetapkan;
5. Perlunya koordinasi antar pihak agar Penataan Aset di Nagari dapat terkelola dengan baik dan dukungan anggaran terhadap sarana dan prasarana dalam melaksanakan kegiatan di 182 Nagari;
6. Perlunya dilakukan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi ke Nagari.

3. Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari :

1. Menoptimalkan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APB Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Menoptimalkan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Agar Tertatanya Pengelolaan Aset Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Menoptimalkan Koordinasi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi antara Pemerintah Nagari, Kecamatan dan DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan.

3. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Mengoptimalkan pertemuan rapat koordinasi bulanan di DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan dengan PKB/PLKB Kecamatan, agar adanya minat akseptor menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
2. Pembagian wilayah kerja sasaran berdasarkan domisili Tim Pendamping Keluarga (TPK) dilakukan ke 182 Nagari, dalam 1 Nagari rata-rata hanya terdapat 1-2 Orang sebagai Tim Pendamping Keluarga (TPK), untuk itu perlu diajukan penambahan anggaran dan tenaga Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting;
3. Penyuluh KB agar melakukan koordinasi dengan lintas sektor;
4. Pelaksanaan kegiatan harus mengacu kepada Rencana Kerja Bulanan, sehingga kegiatan dilaksanakan dapat terukur sesuai target yang ditetapkan;
5. Perlu adanya peningkatan dan penambahan anggaran untuk Pembinaan Kampung KB;
6. Perlunya pemberian pemahaman kepada PKB/PLKB dan masyarakat serta lintas sektor tentang dukungan dan perhatian terhadap Kampung KB;
7. Setiap program dan kegiatan di Nagari sebaiknya dilibatkan Kampung KB.

1.5. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 79);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 238);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 86 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama/isu strategis yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

b. Realisasi Anggaran

Pada sub ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta indikator di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- Penghargaan Yang Diterima Perangkat Daerah Tahun 2025.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Dokumen perencanaan ini secara garis besar memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis yang akan dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang tertuang dalam RPJMD, diwujudkan dengan Tujuan dan Sasaran Strategis masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 86 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026.

Tahun 2023 Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Pohon Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 dan melakukan Rasionalisasi terhadap RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, seiring dengan itu juga dilakukan penyusunan terhadap Pohon Kinerja Perangkat Daerah dan Rasionalisasi terhadap Cascading dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

2.1.1. Visi

Visi merupakan gambaran dan harapan masa depan yang akan diraih dalam waktu yang telah ditentukan. Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 adalah :

“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat Didukung Pemerintahan Yang Akuntabel dan Profesional”.

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut :

- SEJAHTERA** : Meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
- MAJU** : Terwujudnya masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta memiliki wawasan ke depan.
- BERMATABAT**: Kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ABS-SBK (Adat Barsandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah).
- AKUNTABEL** : Memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
- PROFESIONAL**: Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, ditandai dengan meningkatnya partisipasi publik, semakin transparan dan efektifnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

2.1.2. Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Adapun Misi dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

- 1) Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan;
- 2) Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat;
- 3) Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah;
- 4) Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan Sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan;
- 5) Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing; dan
- 6) Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenteram dan Dinamis.

Berdasarkan keenam Misi tersebut, dapat dilihat bahwa Misi Kesatu, Misi Kedua, Misi Keempat, Misi Kelima dan Misi Keenam berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu :

- 1) Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan;
- 2) Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat;
- 4) Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan;
- 5) Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing;
- 6) Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenteram dan Dinamis.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah, ditetapkan Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2021-2026

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Strategis pada Tahun Ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan serta Keluarga Berkualitas	1. Kecepatan Pelayanan Pemerintahan Nagari Pada Masyarakat	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai RB Perangkat Daerah	B (63)	B (64)	B (65)	B (66)	B (67)	B (68)
		2. Persentase Keaktifan Kelembagaan Masyarakat Dalam Membangun Nagari		Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (80,00)	A (81,00)	A (81,00)	A (81,00)	A (81,00)	A (81,00)
		3. Persentase Keaktifan Kelompok Kegiatan		Persentase Nagari Mandiri	4,95% (9 Nagari)	6,04% (11 Nagari)	12,64% (23 Nagari)	17,58% (32 Nagari)	31,00% (56 Nagari)	39,56% (72 Nagari)
		4. Menghitung Jumlah Inovasi yang berhasil diterapkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	100	100	100	100	80	80
		4. Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi Peserta KB Aktif	Terwujudnya Keluarga Bahagia	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,18%	1,15%	1,15%	-	-	-
5. Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang Tidak Ingin Memiliki Anak atau Ingin Anak tapi Ditunda, Tidak Menggunakan Alat Kontrasepsi (Unmet Need)	Indeks Pembangunan Keluarga	-		-	-	61	71	72		

Sumber Data : Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	BASELINE 2024	TARGET TAHUN KE-						KETERANGAN IDENTIFIKASI PERANGKAT DAERAH CROSSCUTTING
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.14.2.13.0.00.03.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Berdaya Saing; ▪ Terwujudnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat; ▪ Meningkatnya Keharmonisan Sosial Berbasis Keluarga; ▪ Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat; ▪ Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Pengurangan Resiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim. 	Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan serta Keluarga Berkualitas		Persentase Desa Mandiri (%)	17,58	31,00	35,16	39,56	43,96	48,35	52,75	
			Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks)	59,49	60,90	62,20	63,50	64,70	65,90	67,00	
			Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,14	1,13	1,12	1,12	1,11	1,11	1,10	
		Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	A (81,00)	A (81,00)	A (81,00)	A (82,00)	A (82,00)	A (82,00)	A (83,00)	Inspektorat Daerah, Sekretariat Daerah, Bapedalitbang, BPKPAD dan Diskominfo
			Jumlah Desa Mandiri (Desa)	32 Nagari	56 Nagari	64 Nagari	72 Nagari	80 Nagari	88 Nagari	96 Nagari	Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinsos, Disdikbud, Dinkes, Dinas Koperasi, Disparpora, Disperkimtanlh, Diskominfo, Bapedalitbang dan DPUTR
		Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	80	80	80	85	85	90	90	Bapedalitbang, Sekretariat Daerah dan Diskominfo
		Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas	Persentase PUS yang ber-KB (%)	61,47%	62,14%	62,89%	63,00%	63,15%	63,30%	63,45%	Dinkes, Dinsos, Disdukcapil, RSUD dan Puskesmas

Sumber Data : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPM DPPKB Kab. Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 pada Aplikasi SIPD-RI Kemendagri Website : <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/renstra/>

2.2. Rencana Kinerja

Kinerja memerlukan ukuran sehingga yang dapat dinilai dengan membandingkannya terhadap standar atau target yang direncanakan. Ukurannya menggunakan indikator yang dapat diukur secara kualitatif maupun kuantitatif. Indikator kinerja yang baik memenuhi unsur **Spesifik (*Specific*)**, **Terukur (*Measurable*)**, **Dapat dicapai secara rasional (*Achievable*)**, **Relevan dengan kebijakan yang sedang berjalan (*Relevant*)**, dan **Memperhitungkan batas waktu pencapaian (*Time-Bound*)**. disingkat dengan **SMART**, diuraikan sebagai berikut :

- 1) **Spesific/Spesifik (S)** : Indikator jelas dan focus (tidak menimbulkan multitafsir).
- 2) **Measurable/Terukur (M)** : Dapat diukur dengan skala penilaian tertentu (kuantitas atau kualitas).
- 3) **Achievable (A)** : Dapat dicapai dengan biaya yang masuk akal dengan metode yang sesuai, berada dalam rentang kendali dan kemampuan unit kerja untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.
- 4) **Relevant (R)** : Terkait secara logis dengan kebijakan/program/ kegiatan yang diukur, tupoksi serta realisasi tujuan dan sasaran strategis organisasi.
- 5) **Time-Bound (T)** : Memperhatikan rentang waktu pencapaian, untuk analisis perbandingan kinerja dengan masa-masa sebelumnya, dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

Karena fitur atau metode *SMART* ini merupakan metode yang paling efektif untuk menentukan target dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi target yang ingin dicapai dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1) Analisis Situasi :

Pahami kondisi saat ini dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, termasuk sumber daya yang ada, tantangan, dan peluang.

2) Penetapan Tujuan :

Tentukan Tujuan yang jelas untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan yang akan membimbing penetapan target.

3) Tujuan Strategis :

Tetapkan tujuan strategis yang ingin dicapai dalam jangka panjang.

4) Indikator Kinerja :

Kembangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian terhadap tujuan tersebut.

5) Target Spesifik :

Tetapkan target spesifik untuk setiap IKU yang telah ditentukan.

6) Rencana Aksi :

Membuat rencana aksi terperinci dengan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai target tersebut.

7) Monitoring dan Evaluasi :

Lakukan monitoring secara berkala dan evaluasi pencapaian target, serta lakukan penyesuaian jika diperlukan.

Dalam kerangka perencanaan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Selanjutnya, RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPD dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai dokumen teknis operasional.

Tabel 2.3. Rencana Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan serta Keluarga Berkualitas	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (81,00)
			Jumlah Nagari Mandiri	56 Nagari
		Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	80
		Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas	Persentase PUS yang ber-KB	62,14%

Sumber Data : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

**Tabel 2.4. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU)
dan Program Pendukung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Penghitungan	Program
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan oleh Tim Penilai Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Jumlah Nagari Mandiri	Hasil Indeks Desa Mandiri Oleh KemendesPDPTT dan DPMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Administrasi Pemerintahan Desa Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Saat Pengentrian Kriteria Inovasi pada Aplikasi IGA	
3.	Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas	Persentase PUS yang ber-KB	Jumlah Peserta KB Aktif/Jumlah PUS	Pengendalian Penduduk
				Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
				Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Sumber Data : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

2.3. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (81,00)
		Jumlah Nagari Mandiri	56 Nagari
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	80
3.	Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas	Persentase PUS yang ber-KB	62,14%

Sumber Data : Revisi Perjanjian Kinerja Kepala Dinas PMDPPKB Kab. Pesisir Selatan Tahun 2025

Perubahan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dari semula Indikator Kinerjanya adalah Persentase Nagari Mandiri dari Tahun 2021 sampai dengan Awal Tahun 2025 diganti menjadi Indikator Kinerja Jumlah Nagari Mandiri Revisi Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2026. Karena Persentase Nagari Mandiri menjadi Indikator Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, yang dimuat dalam dokumen Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja dengan Laporan Kinerja Perangkat Daerah disebabkan adanya penyesuaian kembali Indikator Kinerja tersebut setelah dilakukan harmonisasi dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 2.6. Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.502.538.820	APBD & DAK Fisik KB
2.	Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 524.488.959	APBD
3.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 909.705.488	APBD
4.	Pengendalian Penduduk	Rp. 259.196.099	DAK Non Fisik KB
5.	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 6.065.897.000	APBD & DAK Non Fisik KB
6.	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 2.248.600.000	DAK Non Fisik KB
Jumlah		Rp. 15.510.426.366	

Sumber Data : Revisi Perjanjian Kinerja Kepala Dinas PMDPPKB Kab. Pesisir Selatan Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa akan indikator (*performance improvement*).

Bila mana indikator sasaran strategis mempunyai makna indikator positif, yaitu : semakin tinggi realisasi kinerjanya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasi kinerjanya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Pengukuran Capaian Sasaran Strategis bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan. Penilaian hasil pengukuran Capaian Sasaran Strategis menggunakan klasifikasi penilaian sebagai berikut :

Tabel 3.1. Klasifikasi Penilaian Keberhasilan/Kegagalan
Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Kinerja
Tahun 2025

No.	Klasifikasi Penilaian Kinerja	Predikat
1.	85% - 100%	Sangat Baik
2.	69% - 84%	Baik
3.	53% - 68%	Cukup
4.	< 53%	Gagal

Sumber Data : Klasifikasi Penilaian Kinerja

3.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; maka ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

Tabel 3.2. Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (81,00)	A (80,21)	99,02%
		Jumlah Nagari Mandiri	56 Nagari	87 Nagari	155,36%
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	80	93	116,25%
3.	Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas	Persentase PUS yang ber-KB	62,14%	63,77%	102,62%
Total					118,31%

Sumber Data : Capaian Kinerja DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan Tahun 2025

Dari Tabel 3.2 diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2024 ini ada 3 Sasaran Strategis 4 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, yaitu :

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja

Dalam hal mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja diwujudkan dalam setiap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, terdiri dari Indikator Kinerja Perangkat Daerah, yaitu :

- Nilai AKIP Perangkat Daerah diperoleh dari Dokumen Perangkat Daerah yang telah dievaluasi dan dilakukan penilaiannya, Berdasarkan Hasil Penilaian AKIP oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan target kinerja A (81,00) dan terrealisasi kinerja A (80,21) sedangkan untuk capaian kinerja 99,02%.

- Jumlah Nagari Mandiri diperoleh dari Indeks Desa terdiri dari Nagari Sangat Tertinggal, Nagari Tertinggal, Nagari Berkembang, Nagari Maju dan Nagari Mandiri dan dilakukan penilaiannya ditetapkan secara berjenjang mulai dari Tenaga Ahli Pendamping Desa Kabupaten Pesisir Selatan dengan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) ke DPMD Provinsi Sumatera Barat hingga Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan target kinerja 56 Nagari dan terrealisasi kinerja 87 Nagari sedangkan untuk capaian kinerja 155,36%.

2. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

- Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah dengan target kinerja 80 dan terrealisasi kinerja 93 sedangkan untuk capaian kinerja 116,25%.

3. Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas

Terwujudnya keluarga yang berkualitas adalah kondisi keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan sah, bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, harmonis, dan bertaqwa. Keluarga berkualitas mampu menjalankan 8 fungsi keluarga (agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi, pembinaan lingkungan) secara optimal guna memenuhi kebutuhan fisik-material dan mental-spiritual.

Berikut adalah ciri dan pilar utama terwujudnya keluarga berkualitas :

- Ketahanan Mental dan Spiritual : Keluarga yang harmonis, saling mendukung, memiliki kepercayaan, serta taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- Kesehatan dan Kesejahteraan : Memiliki derajat kesehatan yang baik, jumlah anak ideal, serta ekonomi yang cukup;
- Pendidikan dan Kemandirian : Mampu memberikan pendidikan yang baik bagi anggota keluarga dan memiliki kemandirian;
- Fungsi Keluarga Berjalan : Terlaksananya 8 fungsi keluarga, terutama kasih sayang dan perlindungan, sehingga menciptakan lingkungan aman dan nyaman.

Keluarga berkualitas menjadi pondasi utama untuk menciptakan generasi penerus yang cerdas dan berkarakter, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas dengan target kinerja 62,14% dan terrealisasi kinerja 63,77% sedangkan untuk capaian kinerja 102,62%.

Dari sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, maka diperoleh total sasaran strategis dengan capaian kinerja rata-rata 118,31%. Berdasarkan klasifikasi penilaian termasuk Sangat Baik. Hasil kinerja yang Sangat Baik ini diharapkan untuk Tahun akan datang supaya dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi menuju Sangat Baik.

Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Pesisir Selatan serta menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan.

3.3. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Tabel 3.2 diatas, selanjutnya pada sub bab ini disajikan uraian pencapaian tujuan, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja per sasaran strategis untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Tabel 3.3. Capaian Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Program	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (81,00)	A (80,21)	99,02%	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.502.538.820	Rp. 5.380.558.383	97,78%
		Jumlah Nagari Mandiri	56 Nagari	87 Nagari	155,36%	Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 524.488.959	Rp. 476.655.498	90,88%
						Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 909.705.488	Rp. 761.583.920	83,72%
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	80	93	116,25%				
3.	Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas	Persentase PUS yang ber-KB	62,14%	63,77%	102,62%	Pengendalian Penduduk	Rp. 259.196.099	Rp. 189.923.447	73,27%
						Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 6.065.897.000	Rp. 4.260.275.110	70,23%
						Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 2.248.600.000	Rp. 2.135.981.691	94,99%
Total					118,31%		Rp. 15.510.426.366	Rp. 13.204.978.049	85,14%

Sumber Data : Capaian Kinerja DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan Tahun 2025

1. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan hasil penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja yang dinilai dari 4 komponen dasar manajemen kinerja, yaitu : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Formulasi :

Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan

Pada Tahun 2025 Nilai AKIP Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan dengan target kinerja A (81,00), terrealisasi kinerja A (80,21) dan capaian kinerja 99,02%.

Indikator Kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah pada IKU Hasil Penilaian AKIP dari Inspektorat Daerah dapat dilihat pada lampiran data dukung sesuai Nota Dinas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

2. Jumlah Nagari Mandiri

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa. Indeks Desa (ID) dilaksanakan berdasarkan 6 dimensi yaitu : Layanan Dasar, Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Aksesibilitas dan Tata Kelola Pemerintahan Desa serta melibatkan Kementerian/Lembaga terkait. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa dikelompokkan menjadi 5 konsepsi kriterianya Status Indeks Desa, yaitu : Nagari Sangat Tertinggal, Nagari Tertinggal, Nagari Berkembang, Nagari Maju dan Nagari Mandiri.

Formulasi : Jumlah Nagari yang memenuhi kriteria Nagari Mandiri

dengan hitungan Indikator Kinerja Persentase Nagari Mandiri, sebagai berikut :

Pada Tahun 2025 Jumlah Nagari Mandiri pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan dengan target kinerja 56 Nagari, terrealisasi kinerja 87 Nagari dan capaian kinerja 155,36%.

Selanjutnya di update pada Aplikasi ID dengan Berita Acara Rekapitulasi Penetapan Status Indeks Desa Kabupaten Pesisir Selatan dari Kemendes PDTT dan Buku Indeks Desa Provinsi Sumatera Barat.

3. Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah. Nilai Kematangan Inovasi merupakan nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk dientrikan dalam Aplikasi *Innovative Government Award (IGA)* Kemendagri. Apabila nilai ambang batas minimal tersebut terpenuhi maka inovasi yang kriterianya telah dientri, lebih lanjut akan dilakukan penilaian untuk menentukan Indeks Inovasi Daerah (IID).

Formulasi :

Hasil Penilaian saat Pengentrian Kriteria Inovasi
pada Aplikasi *Innovative Government Award (IGA)* oleh Kemendagri

Pada Tahun 2025 Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan dengan target kinerja 80, terrealisasi kinerja 93 dan capaian kinerja 116,25%. Inovasi yang dilakukan, yaitu : Wisuda Lansia pada Kecamatan Koto XI Tarusan, Kecamatan Bayang dan Kecamatan IV Jurai.

Indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah pada IKU Hasil Penilaian saat Pengentrian Kriteria Inovasi pada Aplikasi *Innovative Government Award (IGA)* oleh Kemendagri karena didaftarkan pada Klinik Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan tidak dilakukannya penginputan data dukung oleh operator terkait inovasi tersebut ke Aplikasi *Innovative Government Award (IGA)*, maka Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan dapat terlaksana dan tidak dapat terrealisasi kinerjanya seperti yang diharapkan.

4. Persentase PUS yang ber-KB

Persentase PUS yang Ber-KB merupakan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan Alat dan Obat Kontrasepsi yang bertujuan untuk mengatur jarak kelahiran.

Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang ber-KB (menggunakan kontrasepsi) di Indonesia bervariasi menurut wilayah dan waktu pendataan, umumnya diukur melalui angka prevalensi kontrasepsi (CPR). Data Badan Pusat Statistik menunjukkan tingkat partisipasi ini, sementara target nasional bertujuan terus meningkatkan cakupan ini.

Berikut adalah poin kunci terkait Persentase PUS ber-KB :

- Definisi : PUS ber-KB adalah pasangan suami istri dengan istri berusia 15-49 Tahun yang menggunakan alat/cara kontrasepsi modern atau tradisional untuk menunda/mencegah kehamilan;

- Variasi Angka : Persentase ini berbeda-beda tiap provinsi. Berdasarkan Data BPS, angka partisipasi di beberapa daerah menunjukkan fluktuasi, seringkali di atas 50-60% di daerah dengan program KB yang kuat;
- Faktor yang Mempengaruhi : Keikutsertaan dipengaruhi oleh pengetahuan tentang efek samping, jumlah anak yang diinginkan, dan akses ke layanan kontrasepsi.

Untuk angka spesifik terbaru atau di wilayah tertentu, disarankan merujuk pada laporan Badan Pusat Statistik Indonesia atau BKKBN tahun berjalan.

$$\text{Persentase PUS yang ber-KB} = \frac{\text{Jumlah PUS yang menggunakan KB}}{\text{Jumlah Seluruh PUS}} \times 100\%$$

Pada Tahun 2025 Persentase PUS yang ber-KB pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan dengan target kinerja 62,14%, terrealisasi kinerja 63,77% dan capaian kinerja 102,62%.

Indikator Kinerja Persentase PUS yang ber-KB diinputkan oleh Operator di 15 Balai Penyuluh KB Kecamatan di Pendataan Keluarga dan Aplikasi New Siga BKKBN serta dapat dilihat pada Lampiran Data Dukung Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

1.1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja

⇒ Indikator Kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah

a. Membandingkan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.4. Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (81,00)	A (80,21)	99,02%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					99,02%

Sumber Data : Capaian Kinerja DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan Tahun 2025

Dari Tabel 3.4. di atas dapat dilihat bahwa Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 masih menggunakan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dikarenakan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan belum tersedia. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 diperoleh dari hasil evaluasi Dokumen Perangkat Daerah terhadap Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

Dari Indikator Kinerja yang telah ditetapkan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan target kinerja A (81,00), terrealisasi kinerja A (80,21) dan capaian kinerja 99,02%, maka untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja tersebut termasuk klasifikasi penilaian kinerja Sangat Baik.

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian Kinerja		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	A (81,00)	A (81,00)	A (81,00)	A (80,44)	A (80,21)	A* (80,21)	99,31%	99,02%	99,02%*

Sumber Data : LHE AKIP Pada DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan

Keterangan : *) Data Capaian Kinerja Tahun 2024

Dari Tabel 3.5. di atas dapat dilihat bahwa perbandingan realisasi kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan diperoleh penilaian Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi dari Dokumen Perangkat Daerah tahun sebelumnya untuk diterapkan pada penilaian Tahun 2023, yaitu : A (80,44), diperoleh penilaian Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi dari Dokumen Perangkat Daerah tahun sebelumnya untuk diterapkan pada penilaian Tahun 2024, yaitu : A (80,21) dan diperoleh penilaian Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi dari Dokumen Perangkat Daerah tahun sebelumnya untuk diterapkan pada penilaian Tahun 2025, yaitu : A (80,21)*.

c. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Perangkat Daerah Strategis Organisasi

Tabel 3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dalam Dokumen Perangkat Daerah Strategis Organisasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target 2021-2026	Capaian (%)	Tingkat Kemajuan
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (80,44)	A (81,00)	99,02%	Akan tercapai (sama atau 100%)

Sumber Data : IKU DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan

Dari Tabel 3.6. di atas dapat dilihat bahwa perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam Dokumen Perangkat Daerah strategis organisasi Berdasarkan Target Kinerja Sasaran Strategis pada Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, mulai dari Tahun 2021, yaitu : A (80,00) sampai dengan Tahun 2026 memiliki target kinerja A (81,00). Selanjutnya capaian kinerja diperoleh dari realisasi kinerja dibandingkan dengan target kinerja sampai dengan Tahun 2025 diperoleh rata-rata capaian kinerja 99,02% diharapkan dapat mengalami peningkatan kemajuan kinerja yang akan tercapai sama dengan target kinerja sebelumnya atau 100%.

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Provinsi dan Nasional

Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Provinsi dan Nasional, dengan rincian sebagai berikut : Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Tabel 3.7. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Standar Kabupaten Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	A (81,00)	A (80,21)	99,02%

Sumber Data : Laporan Kinerja DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

Tabel 3.8. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Standar Provinsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB(74,08)	BB (79,27)	107	Sangat Tinggi

Sumber Data : Laporan Kinerja DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Tabel 3.9. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Standar Nasional Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2023

IKU	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	78,00	66,96	85,85%	Belum Tercapai

Sumber Data : Laporan Kinerja KEMENDES PDDT Republik Indonesia Tahun 2023

Tabel 3.10. Perbandingan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Standar Provinsi dan Nasional Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja		
			DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan	DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat	KEMENDES PDDT Republik Indonesia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	A (80,21)	BB (79,27)	B (66,96)

Sumber Data : Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Kabupaten, Provinsi dan Nasional

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel dan meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mengetahui implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 700.1.2.1/836/INSP/2025 memperoleh nilai 80,21% dengan Kategori Predikat A Interpretasi Memuaskan, terdapat gambaran bahwa Instansi Pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan Pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke Level Eselon 4/Pengawas/Sub Koordinator.

Tabel 3.11. Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 700.1.2.1/836/INSP/2025

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2024
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	25,50
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	22,53
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	12,05
4.	Evaluasi Internal	25,00	20,13
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100,00	
	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP		80,21
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		A

Sumber Data : LHE AKIP Tahun 2024 Pada DPM DPPKB Kab. Pesisir Selatan Nomor : 700.1.2.1/836/INSP/2025

Dari Tabel 3.11. di atas dapat dilihat bahwa Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 700.1.2.1/836/INSP/2025 dengan komponen yang dinilai terdiri dari : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal Perangkat Daerah dengan bobot penilaian yang telah ditentukan maka Dokumen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan penilaian sesuai dengan komponen yang dinilai tersebut.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.12. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (81,00)	A (80,21)	99,02%	Rp. 5.502.538.820	Rp. 5.380.558.383	97,78%	2,22%

Sumber Data : Capaian Kinerja DPM DPPKB Kab. Pesisir Selatan Tahun 2025

Dari Tabel 3.12. di atas dapat dilihat bahwa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Indikator Kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan target kinerja A (81,00), terrealisasi kinerja A (80,21) dan capaian kinerja 99,02%, maka untuk mengukur Tingkat Efisiensi Sumber Daya dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \frac{(\text{Pagu Anggaran Keluaran} \times \text{Capaian Keluaran}) - \text{Realisasi Anggaran Keluaran}}{\text{Pagu Anggaran Keluaran} \times \text{Capaian Keluaran}} \times 100\%$$

Indikator Kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan target kinerja 100% dikurangi dengan capaian anggaran, maka diperoleh Efisiensi Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu : 2,22%.

g. Analisis Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan yang menunjang Indikator Kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah, yaitu :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan terdiri dari :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor;

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;

e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;

f. Fasilitasi Kunjungan Tamu;

g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik;

b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

Dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk mendukung Capaian Indikator Kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 5.502.538.820 dan terrealisasi anggaran Rp. 5.380.558.383 sedangkan untuk capaian anggaran 97,78%.

1.2. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja

⇒ **Indikator Kinerja Jumlah Nagari Mandiri**

a. Membandingkan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.13. Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Jumlah Nagari Mandiri	56 Nagari	87 Nagari	155,36%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					155,36%

Sumber Data : Capaian Kinerja DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan Tahun 2025

Dari Tabel 3.13. di atas dapat dilihat bahwa Jumlah Nagari Mandiri diperoleh dari Indeks Desa (ID), terdiri dari Nagari Sangat Tertinggal, Nagari Tertinggal, Nagari Berkembang, Nagari Maju dan Nagari Mandiri dan dilakukan penilaiannya ditetapkan secara berjenjang mulai dari Tenaga Ahli Pendamping Desa Kabupaten Pesisir Selatan dengan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) ke DPMD Provinsi Sumatera Barat hingga Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan target kinerja 56 Nagari dan terrealisasi kinerja 87 Nagari sedangkan untuk capaian kinerja 155,36%.

Dari Indikator Kinerja yang telah ditetapkan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 Persentase Nagari Mandiri dengan target kinerja 56 Nagari dan terrealisasi kinerja 87 Nagari sedangkan untuk capaian kinerja 155,36%, maka untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja tersebut termasuk klasifikasi penilaian kinerja Sangat Baik.

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.14. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian Kinerja		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Jumlah Nagari Mandiri	Angka	23 Nagari	32 Nagari	56 Nagari	32 Nagari	56 Nagari	87 Nagari	139,10%	175,00%	155,36%

Sumber Data : Berita Acara dan Buku Indeks Desa (ID) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023-2025

Dari Tabel 3.14. di atas dapat dilihat bahwa perbandingan realisasi kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir Jumlah Nagari Mandiri pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan diperoleh penilaian Berdasarkan Buku Indeks Desa (ID) Provinsi Sumatera Barat dan Berita Acara Indeks Desa (ID) Kabupaten Pesisir Selatan untuk diterapkan pada penilaian Tahun 2023, yaitu : 32 Nagari, diperoleh penilaian Berdasarkan Buku Indeks Desa (ID) Provinsi Sumatera Barat dan Berita Acara Indeks Desa (ID) Kabupaten Pesisir Selatan untuk diterapkan pada penilaian Tahun 2024, yaitu : 56 Nagari dan diperoleh penilaian Berdasarkan Buku Indeks Desa (ID) Provinsi Sumatera Barat dan Berita Acara Indeks Desa (ID) Kabupaten Pesisir Selatan untuk diterapkan pada penilaian Tahun 2025, yaitu : 87 Nagari.

c. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Perangkat Daerah Strategis Organisasi

Tabel 3.15. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dalam Dokumen Perangkat Daerah Strategis Organisasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target 2021-2026	Capaian (%)	Tingkat Kemajuan
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Jumlah Nagari Mandiri	87 Nagari	72 Nagari	120,83%	Akan tercapai (sama atau 100%)

Sumber Data : IKU DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan

Dari Tabel 3.15. di atas dapat dilihat bahwa perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam Dokumen Perangkat Daerah strategis organisasi Berdasarkan Target Kinerja Sasaran Strategis pada Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, mulai dari Tahun 2021, yaitu : 9 Nagari sampai dengan Tahun 2026 memiliki target kinerja 72 Nagari. Selanjutnya capaian kinerja diperoleh dari realisasi kinerja dibandingkan dengan target kinerja sampai dengan Tahun 2026 diperoleh rata-rata capaian kinerja 120,83% diharapkan dapat mengalami peningkatan kemajuan kinerja yang akan tercapai sama dengan target kinerja sebelumnya atau 100%.

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Provinsi dan Nasional

Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Provinsi dan Nasional, dengan rincian sebagai berikut : Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Tabel 3.16. Jumlah Nagari Mandiri dengan Standar Kabupaten Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Jumlah Nagari Mandiri	56 Nagari	87 Nagari	155,36%

Sumber Data : Berita Acara Indeks Desa (ID) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

Tabel 3.17. Jumlah Nagari Mandiri dengan Standar Provinsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

NO	KABUPATEN	TOTAL	JUMLAH DESA						
			SUDAH SUBMIT	MANDIRI	MAJU	BERKEMBANG	TERTINGGAL	SANGAT TERTINGGAL	TIDAK TERIDENTIFIKASI
1	AGAM	92	92	50	31	11	0	0	0
2	DHARMASRAYA	52	52	28	15	9	0	0	0
3	KEPULAUAN MENTAWAI	43	43	3	9	21	10	0	0
4	KOTA PARIAMAN	55	55	27	28	0	0	0	0
5	KOTA SAWAHLUNTO	27	27	10	17	0	0	0	0
6	LIMA PULUH KOTA	79	79	70	7	2	0	0	0
7	PADANG PARIAMAN	103	103	26	43	34	0	0	0
8	PASAMAN	62	62	16	31	15	0	0	0
9	PASAMAN BARAT	90	90	12	33	44	1	0	0
10	PESISIR SELATAN	182	182	87	74	21	0	0	0
11	SIJUNJUNG	62	62	47	12	3	0	0	0
12	SOLOK	74	74	26	24	22	2	0	0
13	SOLOK SELATAN	39	39	20	15	4	0	0	0
14	TANAH DATAR	75	75	45	25	5	0	0	0
TOTAL		1.035	1.035	467	364	191	13	0	0

Sumber Data : Buku Indeks Desa (ID) DPMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Tabel 3.18. Jumlah Nagari Mandiri dengan Standar Nasional Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Tahun 2025

NO	KLASIFIKASI	JUMLAH
1	Desa Mandiri	20.503 Desa
2	Desa Maju	23.579 Desa
3	Desa Berkembang	21.813 Desa
4	Desa Tertinggal	4.672 Desa
5	Desa Sangat Tertinggal	4.694 Desa
6	Desa tidak memenuhi kriteria*	4 Desa
TOTAL		75.265 Desa

Sumber Data : SK KEMENDESPD TT Republik Indonesia Tahun 2025

Tabel 3.19. Perbandingan Jumlah Nagari Mandiri dengan Standar Provinsi dan Nasional Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja		
			DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan	DPMD Provinsi Sumatera Barat	KEMENDESPD TT Republik Indonesia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Jumlah Nagari Mandiri	87 Nagari	467 Nagari	20.503 Nagari

Sumber Data : Realisasi Kinerja dengan Standar Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2025

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa. Indeks Desa (ID) dilaksanakan berdasarkan 6 dimensi yaitu : Layanan Dasar, Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Aksesibilitas dan Tata Kelola Pemerintahan Desa serta melibatkan Kementerian/Lembaga terkait. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa dikelompokkan menjadi 5 konsepsi kriterianya Status Indeks Desa, yaitu : Nagari Sangat Tertinggal, Nagari Tertinggal, Nagari Berkembang, Nagari Maju dan Nagari Mandiri.

Aspek Sosial, Ekonomi dan Lingkungan menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk kesejahteraan masyarakat Desa, sehingga kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Selanjutnya Indeks Desa Membangun juga didayagunakan untuk mengarahkan keakurasian intervensi kebijakan Pemerintah sesuai dengan partisipasi masyarakat dan karakteristik wilayah Desa (tipologi dan modal sosial) yang saling berkorelasi.

- Faktor Keberhasilan Desa/Nagari Mandiri :
 - a. Kebutuhan Dasar (Sandang, Pangan dan Papan);
 - b. Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur);
 - c. Lingkungan;
 - d. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari.
- Faktor Hambatan/Kendala Desa/Nagari Mandiri :
 - a. Kurangnya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;
 - b. Terbatasnya Sumber Daya Manusia di Desa/Nagari yang memiliki kompetensi pada bidang tersebut;
 - c. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasana pendukung untuk pelaksanaan kegiatan di Desa/Nagari.
- Solusi Desa/Nagari Mandiri :

Dalam Penetapan Desa/Nagari Mandiri terhadap penyusunan perencanaan Nagari beberapa hal yang perlu ditingkatkan adalah Pelayanan Dasar, Kebutuhan Dasar dan Peningkatan Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan

Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa/Nagari Mandiri adalah Desa/Nagari yang mempunyai ketersediaan akses terhadap pelayanan dasar yang mencakup : infrastruktur yang memadai akseibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan Pemerintahan yang sudah Sangat Baik dan Desa/Nagari Mandiri adalah Desa/Nagari yang memiliki Nilai Indeks Desa (ID) $\geq 75\%$. dengan rincian Nagari Mandiri di Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

Jumlah Nagari Mandiri Tahun 2025 terdapat 56 Nagari Mandiri pada dari 182 Nagari yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut ini Tabel Lokasi Nagari Mandiri Tahun 2025 di Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai berikut :

Tabel 3.20. Rekap Data ID Status Nagari Mandiri di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

NO.	ID PROVINSI	PROVINSI	ID KABUPATEN	KABUPATEN/KOTA	ID KECAMATAN	KECAMATAN	ID NAGARI	NAGARI	DIMENSI LAYANAN DASAR	DIMENSI SOSIAL	DIMENSI EKONOMI	DIMENSI LINGKUNGAN	DIMENSI AKSESIBILITAS	DIMENSI TATA KELOLA PEMERINTAHAN	SNDR	STATUS INDEKS DESA TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = (10+11+12+13+14+15) / 633	17
1	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130101	Pancung Soal	1301012002	Muaro Sakai Inderapura	143	78	120	70	49	67	82,99	MANDIRI
2	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130101	Pancung Soal	1301012003	Tiga Sepakat Inderapura	139	80	110	70	49	66	80,94	MANDIRI
3	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130101	Pancung Soal	1301012005	Kudo-Kudo Inderapura	160	84	138	78	48	69	90,87	MANDIRI
4	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130101	Pancung Soal	1301012006	Inderapura Selatan	154	79	113	74	49	69	84,72	MANDIRI
5	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130101	Pancung Soal	1301012009	Simpang Lama Inderapura	136	76	123	70	46	69	81,89	MANDIRI
6	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130101	Pancung Soal	1301012010	Tigo Sungai Inderapura	166	76	119	68	49	64	85,35	MANDIRI
7	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130101	Pancung Soal	1301012011	Tiak Ampu Inderapura	144	77	111	74	42	67	81,10	MANDIRI
8	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130101	Pancung Soal	1301012012	Inderapura Tengah	123	78	130	68	49	60	80,00	MANDIRI
9	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130102	Ranah Pesisir	1301022001	Pelangai	148	69	129	58	49	57	80,31	MANDIRI
10	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130102	Ranah Pesisir	1301022004	Surgai Turu Barat	143	64	132	52	48	69	80,00	MANDIRI
11	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130102	Ranah Pesisir	1301022007	Koto VII Pelangai	146	65	135	56	44	62	80,00	MANDIRI
12	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130103	Lengayang	1301032001	Kambahang	150	74	123	44	49	71	80,47	MANDIRI
13	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130103	Lengayang	1301032002	Lakitan	133	57	133	72	50	68	80,79	MANDIRI
14	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130103	Lengayang	1301032005	Kambahang Barat	146	71	125	60	48	66	81,26	MANDIRI
15	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130103	Lengayang	1301032006	Lakitan Utara	151	82	124	67	50	76	86,61	MANDIRI
16	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130103	Lengayang	1301032009	Lakitan Tengah	147	65	129	78	48	55	82,20	MANDIRI
17	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130104	Batang Kapas	1301042001	IV Koto Hillie	152	70	129	78	48	53	83,46	MANDIRI
18	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130104	Batang Kapas	1301042003	Talauk	129	75	131	77	49	73	84,09	MANDIRI
19	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130104	Batang Kapas	1301042004	Koto Nan Duo IV Koto Hillie	130	71	130	70	48	69	81,57	MANDIRI
20	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130104	Batang Kapas	1301042008	Surgai Nyuko IV Koto Mudiek	140	63	132	60	46	70	80,47	MANDIRI
21	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130105	IV Jurai	1301052001	Palman	149	74	127	75	48	56	83,31	MANDIRI
22	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130105	IV Jurai	1301052002	Tambahang	122	72	134	78	48	66	81,89	MANDIRI
23	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130105	IV Jurai	1301052003	Salido	158	76	143	74	49	70	89,76	MANDIRI
24	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130105	IV Jurai	1301052004	Lumpo	153	72	105	78	47	66	82,05	MANDIRI
25	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130105	IV Jurai	1301052005	Bunga Pasang Salido	142	78	122	84	47	55	83,15	MANDIRI
26	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130105	IV Jurai	1301052006	Sago Salido	138	74	139	61	45	75	83,78	MANDIRI
27	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130105	IV Jurai	1301052012	Ampuan Lumpo	137	75	119	74	49	70	82,52	MANDIRI
28	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130105	IV Jurai	1301052015	Surgai Gayo Lumpo	146	75	124	76	46	64	83,62	MANDIRI
29	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130105	IV Jurai	1301052019	Palman Selatan Palman	163	78	139	86	49	67	91,65	MANDIRI
30	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130105	IV Jurai	1301052020	Palman Timur Palman	139	65	132	75	49	60	81,89	MANDIRI
31	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130106	Bayang	1301062005	Koto Berapak	152	67	129	59	49	71	82,99	MANDIRI
32	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130106	Bayang	1301062006	Talaok	133	75	135	62	43	65	80,79	MANDIRI
33	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130106	Bayang	1301062007	Pasar Baru	157	78	139	86	49	58	89,29	MANDIRI
34	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130106	Bayang	1301062012	Sawah Laweh Pasar Baru	146	67	122	68	46	57	79,69	MANDIRI
35	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130107	Koto XI Tarusan	1301072003	Duka	141	79	113	72	49	63	81,42	MANDIRI

NO.	ID PROVINSI	PROVINSI	ID KABUPATEN	KABUPATEN/NOTA	ID KECAMATAN	KECAMATAN	ID NAGARI	NAGARI	DIMENSI LAYANAN DASAR	DIMENSI SOSIAL	DIMENSI EKONOMI	DIMENSI LINGKUNGAN	DIMENSI AKSESBILITAS	DIMENSI TATA KELOLA PEMERINTAHAN	SNDR	STATUS INDEKS DESA TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = (10+11+12+13+14+15) / 635	17
36	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130107	Koto XI Tarusan	1301072004	Batu Hampar	157	78	126	74	49	67	86,77	MANDIRI
37	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130107	Koto XI Tarusan	1301072005	Nanggalo	141	72	142	67	49	67	84,72	MANDIRI
38	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130107	Koto XI Tarusan	1301072006	Ampang Palat	124	75	135	74	49	67	82,52	MANDIRI
39	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130107	Koto XI Tarusan	1301072007	Kapuh	141	79	108	76	49	68	82,05	MANDIRI
40	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130107	Koto XI Tarusan	1301072008	Barung-Barung Balantai	160	76	138	62	50	66	86,93	MANDIRI
41	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130107	Koto XI Tarusan	1301072017	Jinang Kampung Pansur	149	75	133	66	50	61	84,09	MANDIRI
42	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130107	Koto XI Tarusan	1301072020	Batu Hampar Selatan	144	78	131	64	50	65	83,78	MANDIRI
43	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130108	Subera	1301082002	Suranthi	158	69	122	68	41	71	83,31	MANDIRI
44	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130108	Subera	1301082003	Amping Parak	154	77	131	68	35	80	85,83	MANDIRI
45	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130108	Subera	1301082005	Koto Taratak	144	78	106	72	41	66	79,84	MANDIRI
46	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130108	Subera	1301082006	Lamsano Taratak	133	72	120	74	49	65	80,79	MANDIRI
47	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130108	Subera	1301082010	Koto Nan Tigo Utara	150	79	110	71	47	53	80,31	MANDIRI
48	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130109	Linggo Sari Baganti	1301092001	Punggasan	152	75	119	58	47	64	81,10	MANDIRI
49	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130109	Linggo Sari Baganti	1301092002	Air Haji	144	73	116	66	48	74	82,05	MANDIRI
50	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130109	Linggo Sari Baganti	1301092003	Punggasan Utara	154	69	126	60	38	73	81,89	MANDIRI
51	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130109	Linggo Sari Baganti	1301092006	Lagan Mudik Punggasan	143	62	114	80	49	80	83,15	MANDIRI
52	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130109	Linggo Sari Baganti	1301092007	Lagan Hillir Punggasan	146	68	124	55	46	69	80,00	MANDIRI
53	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130109	Linggo Sari Baganti	1301092009	Pasar Lama Muara Air Haji	149	83	110	71	49	67	83,31	MANDIRI
54	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130109	Linggo Sari Baganti	1301092011	Air Haji Barat	132	78	134	60	44	61	80,16	MANDIRI
55	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130109	Linggo Sari Baganti	1301092012	Air Haji Tengah	130	76	132	59	47	62	79,69	MANDIRI
56	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130109	Linggo Sari Baganti	1301092013	Rantau Simalerang Air Haji	135	79	120	82	49	67	83,78	MANDIRI
57	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130109	Linggo Sari Baganti	1301092014	Muara Gadang Air Haji	131	75	140	60	33	69	80,00	MANDIRI
58	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130109	Linggo Sari Baganti	1301092015	Sungai Strah Air Haji	147	81	127	64	48	65	83,78	MANDIRI
59	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130110	Lunang	1301102001	Lunang	135	77	137	80	49	63	85,20	MANDIRI
60	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130110	Lunang	1301102003	Lunang Utara	142	64	148	86	47	79	89,13	MANDIRI
61	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130110	Lunang	1301102004	Lunang Selatan	165	77	146	62	39	58	86,14	MANDIRI
62	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130110	Lunang	1301102005	Lunang Barat	127	82	134	76	42	74	84,25	MANDIRI
63	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130110	Lunang	1301102015	Sindang Lunang	142	71	132	74	45	69	83,94	MANDIRI
64	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130110	Lunang	1301102016	Pondok Parian Lunang	140	71	135	72	40	59	81,42	MANDIRI
65	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130110	Lunang	1301102017	Lunang Tengah	133	61	144	82	40	60	81,89	MANDIRI
66	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130110	Lunang	1301102018	Lunang Sahu	129	82	156	76	49	71	88,66	MANDIRI
67	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130110	Lunang	1301102019	Lunang Dua	135	71	149	62	40	72	83,31	MANDIRI
68	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130110	Lunang	1301102020	Lunang Tiga	135	80	142	78	40	72	86,14	MANDIRI
69	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130111	Basa Amppek Balai Tapan	1301112001	Tapan	147	75	118	62	47	63	80,63	MANDIRI
70	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130111	Basa Amppek Balai Tapan	1301112002	Pasar Tapan	142	76	133	58	48	56	80,79	MANDIRI
71	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130111	Basa Amppek Balai Tapan	1301112008	Ampang Tatak Tapan	158	60	119	64	48	58	79,84	MANDIRI
72	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130111	Basa Amppek Balai Tapan	1301112010	Batang Belung Tapan	122	56	115	58	45	67	72,91	MANDIRI
73	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130111	Basa Amppek Balai Tapan	1301112018	Koto Anas Tapan	144	79	129	66	49	62	83,31	MANDIRI
74	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130111	Basa Amppek Balai Tapan	1301112019	Dusun Baru Tapan	125	73	103	70	45	69	76,38	MANDIRI
75	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130112	IV Nagari Bayang Utara	1301122001	Puluk-Puluk	125	78	129	74	49	64	81,73	MANDIRI
76	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130112	IV Nagari Bayang Utara	1301122005	Puluk-Puluk Selatan	155	79	116	66	48	56	81,89	MANDIRI
77	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130113	Airpura	1301132001	Inderapura Utara	146	77	130	76	35	67	83,62	MANDIRI
78	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130113	Airpura	1301132002	Muara Inderapura	137	72	147	58	48	80	85,35	MANDIRI

NO.	ID PROVINSI	PROVINSI	ID KABUPATEN	KABUPATEN/KOTA	ID KECAMATAN	KECAMATAN	ID NAGARI	NAGARI	DIMENSI LAYANAN DASAR	DIMENSI SOSIAL	DIMENSI EKONOMI	DIMENSI LINGKUNGAN	DIMENSI ARSEBILITAS	DIMENSI TATA KELOLA PEMERINTAHAN	SNDR	STATUS INDEKS DESA TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	$16 = (10+11+12+13+14+15) / 635$	17
79	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130113	Airpura	1301132003	Damar Lapan Batang	148	72	132	54	42	65	80,79	MANDIRI
80	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130113	Airpura	1301132004	Lalang Panjang Inderapura	149	77	152	78	49	76	91,50	MANDIRI
81	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130113	Airpura	1301132005	Palokan Inderapura	143	79	140	58	42	65	82,99	MANDIRI
82	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130113	Airpura	1301132007	Thuk Kuala Inderapura	135	82	117	74	50	75	83,94	MANDIRI
83	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130113	Airpura	1301132008	Tanah Bakali Inderapura	142	77	150	72	48	65	87,24	MANDIRI
84	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130113	Airpura	1301132009	Inderapura Timur	151	75	112	72	50	64	82,52	MANDIRI
85	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130115	Silaut	1301152002	Sungai Sirih	149	62	132	50	46	67	79,69	MANDIRI
86	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130115	Silaut	1301152003	Sungai Serik	147	65	140	70	40	56	81,57	MANDIRI
87	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130115	Silaut	1301152004	Sungai Puhai	144	63	144	82	38	78	86,46	MANDIRI
88	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130115	Silaut	1301152005	Pasir Binjai	142	57	141	80	45	74	84,88	MANDIRI
89	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130115	Silaut	1301152008	Lubuk Bunta	145	71	144	68	40	72	85,04	MANDIRI
90	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130115	Silaut	1301152009	Air Hitam	117	67	141	66	49	79	81,73	MANDIRI
91	13	SUMATERA BARAT	1301	Pesisir Selatan	130115	Silaut	1301152010	Sambungo	124	77	132	78	32	75	81,57	MANDIRI

Sumber Data : Berita Acara Indeks Desa (ID) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

Dari Tabel 3.20. Rekap Data ID Status Nagari Mandiri di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dapat dilihat bahwa Nagari Mandiri diukur Berdasarkan 6 dimensi yaitu : Layanan Dasar, Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Aksesibilitas dan Tata Kelola Pemerintahan Desa.

Indikator Kinerja Jumlah Nagari Mandiri dengan target kinerja 56 Nagari, terrealisasi kinerja 87 Nagari dan capaian kinerja 155,36%, maka untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja tersebut termasuk nilai predikatnya Sangat Baik.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.21. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Jumlah Nagari Mandiri	56 Nagari	87 Nagari	155,36%	Rp. 1.434.194.447	Rp. 1.238.239.418	90,88%	25,40%

Sumber Data : Capaian Kinerja DPM DPPKB Kab. Pesisir Selatan Tahun 2025

Dari Tabel 3.21. di atas dapat dilihat bahwa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Indikator Kinerja Persentase Nagari Mandiri dengan target kinerja 56 Nagari, terrealisasi kinerja 87 Nagari dan capaian kinerja 155,36%, maka untuk mengukur Tingkat Efisiensi Sumber Daya dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \frac{(\text{Pagu Anggaran Keluaran} \times \text{Capaian Keluaran}) - \text{Realisasi Anggaran Keluaran}}{\text{Pagu Anggaran Keluaran} \times \text{Capaian Keluaran}} \times 100\%$$

Indikator Kinerja Jumlah Nagari Mandiri dengan target kinerja 100% dikurangi dengan capaian anggaran, maka diperoleh Tingkat Efisiensi Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu : 25,40%.

g. Analisis Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan yang menunjang Indikator Kinerja Persentase Nagari Mandiri, yaitu :

I. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Kegiatan terdiri dari :

1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa;
- b. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
- c. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa;
- d. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- e. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa;
- f. Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa.

II. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Kegiatan terdiri dari :

2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat;
- b. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
- c. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
- d. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

Dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk mendukung Capaian Indikator Kinerja Jumlah Nagari Mandiri pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 dengan Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan anggaran Rp. 524.488.959 dan terrealisasi anggaran Rp. 476.655.498 sedangkan untuk capaian anggaran 90,88%. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan anggaran Rp. 909.705.488 dan terrealisasi anggaran Rp. 761.583.920 sedangkan untuk capaian anggaran 83,72%.

2. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

a. Membandingkan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.22. Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	80	93	116,25%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					116,25%

Sumber Data : Capaian Kinerja DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan Tahun 2025

Dari Tabel 3.22. di atas dapat dilihat bahwa Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dengan target kinerja 80 dan terrealisasi kinerja 93 sedangkan untuk capaian kinerja 116,25%.

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.23. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian Kinerja		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	100	100	80	0	0	93	0	0	116,25%

Sumber Data : Rekap Nilai Inovasi Kab. Pesisir Selatan

Dari Tabel 3.23. di atas dapat dilihat bahwa perbandingan realisasi kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan diperoleh penilaian Berdasarkan Rekap Nilai Inovasi Kabupaten Pesisir Selatan tahun sebelumnya untuk diterapkan pada penilaian Tahun 2023, yaitu : 0, diperoleh penilaian Berdasarkan Rekap Nilai Inovasi Kabupaten Pesisir Selatan tahun sebelumnya untuk diterapkan pada penilaian Tahun 2024, yaitu : 0 dan diperoleh penilaian Berdasarkan Rekap Nilai Inovasi Kabupaten Pesisir Selatan tahun sebelumnya untuk diterapkan pada penilaian Tahun 2025, yaitu : 93.

c. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Perangkat Daerah Strategis Organisasi

Tabel 3.24. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dalam Dokumen Perangkat Daerah Strategis Organisasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target 2021-2026	Capaian (%)	Tingkat Kemajuan
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	93	80	116,25%	Akan tercapai (sama atau 100%)

Sumber Data : IKU DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan

Dari Tabel 3.24. di atas dapat dilihat bahwa perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam Dokumen Perangkat Daerah strategis organisasi Berdasarkan Target Kinerja Sasaran Strategis pada Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, mulai dari Tahun 2021, yaitu : 100 sampai dengan Tahun 2026 memiliki target kinerja 80. Selanjutnya capaian kinerja diperoleh dari realisasi kinerja dibandingkan dengan target kinerja sampai dengan Tahun 2026 diperoleh rata-rata capaian kinerja 116,25% diharapkan dapat mengalami peningkatan kemajuan kinerja yang akan tercapai sama dengan target kinerja sebelumnya atau 100%.

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Provinsi dan Nasional

Perbandingan realisasi kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dengan Provinsi dan Nasional, tidak dapat dibandingkan karena merupakan target spesifik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

- Analisis Keberhasilan/Kegagalan :

Berbeda dan berubahnya inovasi dari tahun sebelumnya, sehingga inovasi tersebut bisa terlaksana dan diterapkan secara optimal, seperti yang diharapkan, karena dibentuknya Tim Khusus untuk melaksanakan inovasi yang diusulkan dan adanya kendala keterbatasan Sumber Daya Manusia yang melaksanakan inovasi tersebut serta operator khusus inovasi yang membantu pelaksanaan kegiatan untuk melakukan upload dokumen, data terkait inovasi tersebut ke aplikasi IGA dan ke Klinik Inovasi di Kab. Pesisir Selatan.

Terwujudnya dan tercapainya Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan dikarenakan masih bersifat digital menggunakan aplikasi IGA, terintegrasi, kemanfaatan inovasi terfokus pada kelompok tertentu/tidak umum serta tidak adanya replikasi oleh daerah lain/stakeholder terkait Perangkat Daerah tersebut.

- Solusi yang dilakukan :

Meningkatkan Nilai Kematangan Inovasi dengan cara meningkatkan kualitas inovasi dari tahun sebelumnya melalui inovasi yang bersifat digital, terintegrasi, bersifat umum dan adanya replikasi oleh daerah lain/stakeholder terkait Perangkat Daerah tersebut.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.25. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	80	93	116,25%	-	-	-	-

Sumber Data : Capaian Kinerja DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan Tahun 2025

Dari Tabel 3.25. di atas dapat dilihat bahwa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah dengan target kinerja 80, terrealisasi kinerja 93 dan capaian kinerja 116,25%, maka untuk mengukur Tingkat Efisiensi Sumber Daya dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \frac{(\text{Pagu Anggaran Keluaran} \times \text{Capaian Keluaran}) - \text{Realisasi Anggaran Keluaran}}{\text{Pagu Anggaran Keluaran} \times \text{Capaian Keluaran}} \times 100\%$$

Indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah dengan target kinerja 80 dikurangi dengan capaian anggaran, maka diperoleh Tingkat Efisiensi Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu : -.

Upaya peningkatan Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan tahun berikutnya adalah :

1. Inovasi dijadikan sebagai pola pemecahan masalah;
2. Evaluasi komitmen kinerja Perangkat Daerah terkait inovasi;
3. Manajemen inovasi; dan
4. Keberlanjutan inovasi.

g. Analisis Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan yang menunjang Indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah, yaitu : keterbatasan anggaran serta tidak adanya Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung terlaksananya inovasi Perangkat Daerah, sehingga ASN terkait inovasi tidak bisa melaksanakannya dan kurangnya sumber daya manusia yang mengelola inovasi tersebut.

3. Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas

a. Membandingkan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.26. Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas	Persentase PUS yang ber-KB	62,14%	63,77%	102,62%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					102,62%

Sumber Data : Capaian Kinerja DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan Tahun 2025

Dari Tabel 3.26. di atas dapat dilihat bahwa Indikator Kinerja yang telah ditetapkan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 Persentase PUS yang ber-KB di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dengan target kinerja 62,14% terrealisasi kinerja 63,77% dan capaian kinerja 102,62%, maka untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja tersebut termasuk klasifikasi penilaian kinerja Sangat Baik.

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.27. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian Kinerja		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Persentase PUS yang ber-KB	%	61,12%	61,47%	62,14%	67,40%	66,86%	63,77%	110,27%	108,77%	102,62%

Sumber Data : Aplikasi Sistem Informasi Keluarga BKKBN

Dari Tabel 3.27. di atas dapat dilihat bahwa perbandingan realisasi kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan diperoleh penilaian Berdasarkan Aplikasi Sistem Informasi Keluarga BKKBN Tahun 2023-2025, yaitu : Indikator Kinerja Persentase PUS yang ber-KB diperoleh penilaian Berdasarkan Aplikasi Sistem Informasi Keluarga BKKBN Indeks Pembangunan Keluarga Tahun 2025, yaitu : 63,77%.

c. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Perangkat Daerah Strategis Organisasi

Tabel 3.28. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dalam Dokumen Perangkat Daerah Strategis Organisasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target 2021-2026	Capaian (%)	Tingkat Kemajuan
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas	Persentase PUS yang ber-KB	63,77%	63,45%	99,50%	Akan tercapai (sama atau 100%)

Sumber Data : IKU DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan

Dari Tabel 3.28. di atas dapat dilihat bahwa perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam Dokumen Perangkat Daerah strategis organisasi Berdasarkan Target Kinerja Sasaran Strategis pada Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, mulai dari Tahun 2025, yaitu : 63,77% sampai dengan Tahun 2026 memiliki target kinerja 63,55%. Selanjutnya capaian kinerja diperoleh dari realisasi kinerja dibandingkan dengan target kinerja sampai dengan Tahun 2026 diperoleh rata-rata capaian kinerja 99,50% diharapkan dapat mengalami peningkatan kemajuan kinerja yang akan tercapai sama dengan target kinerja sebelumnya atau 100%.

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Provinsi dan Nasional

Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Provinsi dan Nasional, dengan rincian sebagai berikut : Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Tabel 3.29. Persentase PUS yang ber-KB dengan Standar Kabupaten Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas	Persentase PUS yang ber-KB	62,14%	63,77%	102,62%

Sumber Data : Capaian Kinerja DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan Tahun 2025

Dari Tabel 3.29. di atas dapat dilihat bahwa Indikator Kinerja Utama Persentase PUS yang ber-KB di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dengan target kinerja 62,14% terrealisasi kinerja 63,77% dan capaian kinerja 102,62%.

Tabel 3.30. Persentase PUS yang ber-KB dengan Standar Provinsi Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas	Persentase PUS yang ber-KB	63,15%	63,50%	100,55%

Sumber Data : Laporan Kinerja DP3AP2KB Kab Sumatera Barat Tahun 2024

Tabel 3.31. Persentase PUS yang ber-KB dengan Standar Nasional Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas	Persentase PUS yang ber-KB	63,40%	61,70%	97,32%

Sumber Data : Kemendukbangga/BKKBN Nasional Tahun 2024

Dari Tabel 3.31. di atas dapat dilihat bahwa menurut Kemendukbangga/BKKBN Indikator Kinerja Utama Persentase PUS yang ber-KB dengan target kinerja 63,40% terrealisasi kinerja 61,70% dan capaian kinerja 97,32% dengan kategori penilaian Sangat Baik.

Tabel 3.32. Perbandingan Indeks Pembangunan Keluarga dengan Standar Provinsi dan Nasional Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja		
			DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan	DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat	Kemendukbangga/ BKKBN Republik Indonesia
1.	2.	3.	4.	5.	7.
1.	Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas	Persentase PUS yang ber-KB	63,77%	63,50%	61,70%

Sumber Data : Realisasi Kinerja dengan Standar Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2024

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Persentase PUS yang Ber-KB merupakan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan Alat dan Obat Kontrasepsi yang bertujuan untuk mengatur jarak kelahiran.

Pada Tahun 2025 Persentase PUS yang ber-KB pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan dengan target kinerja 62,14%, terrealisasi kinerja 63,77% dan capaian kinerja 102,62%.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.33. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas	Persentase PUS yang ber-KB	62,14%	63,77%	102,62%	Rp. 259.196.099	Rp. 189.923.447	73,27%	26,73%
						Rp. 6.065.897.000	Rp. 4.260.275.110	70,23%	29,77%
						Rp. 2.248.600.000	Rp. 2.135.981.691	94,99%	5,01%

Sumber Data : Capaian Kinerja Tahun 2024 DPM DPPKB Kab. Pesisir Selatan

Dari Tabel 3.33. di atas dapat dilihat bahwa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Indikator Kinerja Persentase PUS yang ber-KB dengan target kinerja 62,14%, terrealisasi kinerja 63,77% dan capaian kinerja 102,62%, maka untuk mengukur Tingkat Efisiensi Sumber Daya dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \frac{(\text{Pagu Anggaran Keluaran} \times \text{Capaian Keluaran}) - \text{Realisasi Anggaran Keluaran}}{\text{Pagu Anggaran Keluaran} \times \text{Capaian Keluaran}} \times 100\%$$

Indikator Kinerja Persentase PUS yang ber-KB dengan target kinerja 100% dikurangi dengan capaian anggaran, maka diperoleh Tingkat Efisiensi Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu : 26,73% dan 29,77% serta 5,01%.

g. Analisis Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan yang menunjang Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Keluarga, yaitu :

I. Program Pengendalian Penduduk

Kegiatan terdiri dari :

1. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga;
- b. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga;
- c. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB;

II. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Kegiatan terdiri dari :

2. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal

Sub Kegiatan :

- a. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana;
- b. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok);
- c. Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang;
- d. Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja;

Kegiatan terdiri dari :

3. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

Sub Kegiatan :

- a. Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB;
- b. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya;
- c. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
- d. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya;

Kegiatan terdiri dari :

4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

Sub Kegiatan :

- a. Pembinaan Terpadu Kampung KB;
- b. Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas;

III. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Kegiatan terdiri dari :

1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;

Sub Kegiatan :

a. Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas;

Dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk mendukung Capaian Indikator Kinerja Persentase PUS yang ber-KB di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 dengan Program Pengendalian Penduduk dengan anggaran Rp. 259.196.099 dan terrealisasi anggaran Rp. 189.923.447 sedangkan untuk capaian anggaran 73,27%. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan anggaran Rp. 6.065.897.000 dan terrealisasi anggaran Rp. 4.260.275.110 sedangkan untuk capaian anggaran 70,23%. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan anggaran Rp. 2.248.600.000 dan terrealisasi anggaran Rp. 2.135.981.691 sedangkan untuk capaian anggaran 94,99%.

3.4. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik KB dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik KB terdapat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Fungsional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 untuk melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan menunjang pencapaian 3 Sasaran Strategis dan 4 Indikator Kinerja ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 pada Tabel 2.5. dan 2.6. sebagai berikut :

Tabel 3.34. Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan
Menunjang Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (81,00)	A (80,21)	99,02%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.460.538.820	4.382.520.483	98,25%
						Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.220.000	21.217.000	99,99%
						Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.220.000	21.217.000	99,99%
						Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.876.209.473	3.816.103.603	98,45%
						Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.777.641.473	3.717.551.603	98,41%
						Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	98.568.000	98.552.000	99,98%
						Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.484.100	6.147.900	94,82%
						Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6.484.100	6.147.900	94,82%
						Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	187.697.671	186.902.935	99,58%
						Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.956.173	1.884.860	96,35%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
						Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.942.470	18.420.450	97,24%
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.596.830	34.485.300	99,68%
						Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.052.198	20.012.647	99,80%
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.600.000	3.600.000	100%
						Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.174.000	9.173.000	99,99%
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.376.000	99.326.678	99,95%
						Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	171.628.716	170.616.416	99,41%
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.100.000	28.087.706	96,52%
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	142.528.716	142.528.710	100%
						Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	197.298.860	181.532.629	92,01%
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.690.000	38.712.837	95,14%
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	85.160.500	84.030.792	98,67%
						Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.100.000	8.100.000	100%
						Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	63.348.360	50.689.000	80,02%
						Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.042.000.000	998.037.900	95,78%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		Jumlah Nagari Mandiri	56 Nagari	87 Nagari	155,36%	Program Administrasi Pemerintahan Desa	524.488.959	476.655.498	90,88%
						Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	524.488.959	476.655.498	90,88%
						Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	2.088.700	2.086.700	99,90%
						Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	51.999.900	50.451.183	97,02%
						Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	4.900.000	4.892.000	99,84%
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	442.816.564	396.575.850	89,56%
						Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	2.684.000	2.684.000	100%
						Sub Kegiatan Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	19.999.795	19.965.765	99,83%
						Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	909.705.488	761.583.920	83,72%
						Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	909.705.488	761.583.920	83,72%
						Sub Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	6.298.652	6.291.500	99,89%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
						Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruuna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	255.143.056	153.687.580	60,24%
						Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	6.160.000	6.160.000	100%
						Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	642.103.780	595.444.840	92,73%
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	80	93	116,25%				
3.	Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas	Persentase PUS yang ber-KB	62,14%	63,77%	102,62%	Program Pengendalian Penduduk	259.196.099	189.923.447	73,27%
						Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	259.196.099	189.923.447	73,27%
						Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	59.996.099	57.295.119	95,50%
						Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	109.200.000	70.200.000	64,29%
						Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	90.000.000	62.428.328	69,36%
						Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	6.065.897.000	4.260.275.110	70,23%
						Kegiatan Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.639.000.000	1.128.826.510	68,87%
						Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	1.014.000.000	789.665.850	77,88%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	300.000.000	177.807.000	59,27%
						Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program Bangga Kencana melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	125.000.000	94.213.000	75,37%
						Sub Kegiatan Advokasi Program Bangga Kencana oleh Pokja Advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	200.000.000	67.140.660	33,57%
						Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.448.800.000	1.321.600.000	91,22%
						Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	1.448.800.000	1.321.600.000	91,22%
						Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	974.900.000	854.960.600	87,70%
						Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	28.800.000	28.800.000	100%
						Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	879.816.000	773.770.600	87,95%
						Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	66.284.000	52.390.000	79,04%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
						Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.003.197.000	954.888.000	47,67%
						Sub Kegiatan Pembinaan Terpadu Kampung KB	1.002.197.000	477.000.000	47,60%
						Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	1.001.000.000	477.888.000	47,74%
						Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2.248.600.000	2.135.981.691	94,99%
						Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.248.600.000	2.135.981.691	94,99%
						Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	2.248.600.000	2.135.981.691	94,99%
Total					118,31%		Rp. 15.510.426.366	Rp. 13.204.978.049	85,14%

Sumber Data : Aplikasi SIPD-RI Kemendagri dan Realisasi Anggaran DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan dari Fungsional Desember Tahun 2025

Dari Tabel 3.34 di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, maka diperoleh total sasaran strategis capaian kinerja 118,31%. Sedangkan Program yang telah ditetapkan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 untuk menunjang pencapaian 3 Sasaran Strategis dan 4 Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Eselon II, III, IV, JFT dan Staf Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, maka diperoleh total anggaran Rp. 15.510.426.366 dan terrealisasi anggaran Rp. 13.204.978.049 sedangkan untuk capaian anggaran 85,14%.
2. Dalam melaksanakan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2025 dengan pengukuran sasaran strategis, maka diperoleh rata-rata capaian program 85,14%. Berdasarkan klasifikasi penilaian termasuk Sangat Baik. Hasil kinerja yang Sangat Baik ini diharapkan untuk Tahun akan datang supaya dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi menuju Sangat Baik.
3. Selama pelaksanaan kegiatan Tahun 2025 dari awal pelaksanaan sampai akhir pelaksanaan kegiatan adanya efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 2.305.448.317, maka untuk mengukur Tingkat Efisiensi Sumber Daya dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \frac{(\text{Pagu Anggaran Keluaran} \times \text{Capaian Keluaran}) - \text{Realisasi Anggaran Keluaran}}{\text{Pagu Anggaran Keluaran} \times \text{Capaian Keluaran}} \times 100\%$$

Dari 4 Indikator Kinerja telah ditetapkan dengan target kinerja 100% dikurangi dengan capaian anggaran, maka diperoleh Tingkat Efisiensi Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu : 14,86%.

4. Dalam mencapai target kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan melakukan Perjanjian Kinerja (PK) secara berjenjang dan bertingkat dengan atasan langsung, yaitu : mulai dari Kepala Dinas (Eselon II) dengan bertanggungjawab kepada Bupati, Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang (Eselon III) dengan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian dan Fungsional Tertentu (Eselon IV) dengan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang, serta Staf dengan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian dan Kepala Bidang ataupun Sekretaris Dinas, yang telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan masing-masing atasan langsung, agar alokasi anggaran dan realisasi anggaran dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa kinerja pada BAB III, Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan dapat disimpulkan, sebagai berikut :

a. Capaian Sasaran Strategis

Dari 3 sasaran strategis yang telah ditetapkan, terdiri dari 4 indikator kinerja, maka capaian sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja, terdiri dari 2 indikator kinerja, yaitu :

- Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan target kinerja A (81,00) dan terrealisasi kinerja A (80,21) sedangkan untuk capaian kinerja 99,02%.
- Jumlah Nagari Mandiri dengan target kinerja 56 Nagari dan terrealisasi kinerja 87 Nagari sedangkan untuk capaian kinerja 155,36%.

Dari Sasaran Starategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja dengan Indikator Kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah dan Jumlah Nagari Mandiri dengan predikat penilaian Sangat Baik.

2. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah, terdiri dari 1 indikator kinerja, yaitu :

- Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah dengan target kinerja 80, terrealisasi kinerja 93, capaian indikator kinerja 116,25%.

Dari Sasaran Starategis Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah dengan Indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah dengan predikat penilaian Sangat Baik.

3. Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas, terdiri dari 1 indikator kinerja, yaitu :

- Persentase PUS yang ber-KB dengan target kinerja 62,14% dan terrealisasi kinerja 63,77% sedangkan untuk capaian kinerja 102,62%.

Dari Sasaran Starategis Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas dengan Indikator Kinerja Persentase PUS yang ber-KB dengan predikat penilaian Sangat Baik.

Dari 4 Indikator Kinerja tersebut, terdapat semua Indikator Kinerja terlaksana dengan Sangat Baik melebihi target yang telah ditetapkan.

b. Capaian Indikator Kinerja

Dari 4 indikator kinerja yang telah ditetapkan rata-rata capaian indikator kinerja adalah 100%, dimana indikator kinerja mulai dari yang tertinggi hingga sampai dengan indikator kinerja terrendah, yaitu :

- Capaian Indikator Kinerja Tertinggi :

Jumlah Nagari Mandiri dengan capaian kinerjanya adalah 155,36%, selanjutnya indikator kinerja dengan Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah dengan capaian kinerjanya adalah 116,25% dan indikator kinerja setelahnya Persentase PUS yang ber-KB dengan capaian kinerjanya adalah 102,62%.

- Capaian Indikator Kinerja Terrendah :

Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan capaian kinerjanya adalah 99,02%.

c. Capaian Realisasi Anggaran

Dari Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025 yang bersumber dari DAU/APBD, DAK Fisik KB dan DAK Non Fisik KB terdapat 2 Urusan, 6 Program, 14 Kegiatan dan 42 Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 5.502.538.820 dan terrealisasi anggaran Rp. 5.380.558.383 sedangkan untuk capaian anggaran 97,78%.
2. Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan anggaran Rp. 524.488.959 dan terrealisasi anggaran Rp. 476.655.498 sedangkan untuk capaian anggaran 90,88%.
3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan anggaran Rp. 909.705.488 dan terrealisasi anggaran Rp. 761.583.920 sedangkan untuk capaian anggaran 83,72%.
4. Program Pengendalian Penduduk dengan anggaran Rp. 259.196.099 dan terrealisasi anggaran Rp. 189.923.447 sedangkan untuk capaian anggaran 73,27%.
5. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan anggaran Rp. 6.065.897.000 dan terrealisasi anggaran Rp. 4.260.275.110 sedangkan untuk capaian anggaran 70,23%.
6. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan anggaran Rp. 2.248.600.000 dan terrealisasi anggaran Rp. 2.135.981.691 sedangkan untuk capaian anggaran 94,99%.

Dari sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, maka diperoleh total sasaran strategis capaian kinerjanya adalah 118,31%. Sedangkan Program yang telah ditetapkan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, maka diperoleh total anggaran Rp. 15.510.426.366 dan terrealisasi anggaran Rp. 13.204.978.049 sedangkan untuk capaian anggaran 85,14%, maka Berdasarkan Klasifikasi Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Kinerja Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan termasuk dengan predikat penilaian Sangat Baik melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan.

4.2. Saran

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya sebagai berikut :


- a. Meningkatkan kerjasama dengan stakeholders terkait atau pemangku kepentingan, baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan program pembangunan agar dapat berjalan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan, Renstra, RKPD dan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Meningkatkan monitoring dan evaluasi atau pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Nagari, Badan Musyarwarah Nagari, Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag), Badan Usaha Milik Bersama (BUMNagma), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) serta Penyuluh Keluarga Berencana atau Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) terdapat di 15 Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan dan melakukan pembinaan kader KB pada 182 Nagari Se-Kabupaten Peissir Selatan.



LAMPIRAN LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2025

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Jln. Setia Budi No. 200 Painan Kode Pos : 25651
Telp. (0756) 21293, E-mail : dpmppkbessel@gmail.com



 <https://dpmppkb.pesisirselatankab.go.id/>
DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**


Jalan Setia Budi Nomor 200 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Laman <https://dpm DPPKB.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el dinaspemdes@pesisirselatankab.go.id

**PIAGAM PENGHARGAAN YANG DITERIMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2025**

No.	Bidang/Bagian	Kegiatan	Nama Penghargaan	Dokumentasi (Foto Piagam dan Piala/Foto Saat Penerimaan Penghargaan)	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan
1.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Piagam Penghargaan dari Telkomsel ke DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan Atas Kerjasama Telkomsel Sepanjang Tahun 2024		Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat Padang, 13 Februari 2025
2.	Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya	Teknologi Tepat Guna di Kab. Pesisir Selatan	Piagam Penghargaan ke Cendra Kanedi Nagari Sungai Tunu Barat Kab. Pesisir Selatan Lomba Teknologi Tepat Guna Unggulan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebagai Juara III Alat Penggilingan Brondol Sawit menjadi Minyak Mentah Kab. Pesisir Selatan		Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat Padang, 10 Maret 2025

No.	Bidang/Bagian	Kegiatan	Nama Penghargaan	Dokumentasi (Foto Piagam dan Piala/Foto Saat Penerimaan Penghargaan)	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan
3.	Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPMN, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum Adat	Piagam Penghargaan ke Nagari Sungai Gayo Lumpo Kab. Pesisir Selatan sebagai Juara II Pada Lomba Nagari/Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025		Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat Padang, 7 Juli 2025
4.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Inovasi Perangkat Daerah Wulan (Wisuda Lansia)	Sertifikat Penghargaan Atas Pencapaian Nilai Kematangan Inovasi Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kab. Pesisir Selatan		Bapedalitbang Kab. Pesisir Selatan Pesisir Selatan, 26 September 2025

Painan, 31 Desember 2025
 PII KEPALA DINAS PMDPPKB
 KAB. PESIR SELATAN


DENNY ANGGARA, S.STP., M.Ec., Dev.
 NIP. 19870101 200602 1 001